

LKJIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN T.A 2025

KUALA
PEMBUANG - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah kode Pos 74212
Telepon (0538) 2022211, Fax. (0538) 2022211 Laman : www.seruyankab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Pembuang, 24 Februari 2026

Pj. Sekretaris Daerah



Bahrhun Abbas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025** dapat disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat informasi secara transparan, terukur, dan akuntabel mengenai capaian kinerja sasaran strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran yang telah dilaksanakan.

Sebagai bagian dari implementasi SAKIP, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian kinerja. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai media akuntabilitas publik, bahan evaluasi kinerja, serta pendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, Februari 2026
Pj Sekretaris Daerah


Bahrin Abbas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	3
1.3. Sumber Daya Manusia.....	27
1.4. Isu Strategis	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	33
2.1. Perencanaan Strategis	33
2.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan	35
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	39
2.4. Isu Strategis	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1. Capaian Kinerja	48
3.2. Realisasi Anggaran	83
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah	27
Tabel 1.2 Komposisi PNS dan P3K Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan	27
Tabel 1.3 Komposisi PNS dan P3K Sekretariat Daerah berdasarkan Eselon	27
Tabel 1.3 Komposisi PNS dan P3K Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan	28
Tabel 1.7 Isu Staretgis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.....	32
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	37
Tabel 2.2 Penetapan Perencanaan Kinerja	42
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja.....	48
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	49
Tabel 3.3 Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025	49
Tabel 3.4 Perbandingan Data Kinerja	51
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi	51
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025	52
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD	55
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional	55
Tabel 3.9 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi	56
Tabel 3.10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58
Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60

Tabel 3.12 Perbandingan Data Kinerja	62
Tabel 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi	63
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025	64
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD	67
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional	68
Tabel 3.17 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi	69
Tabel 3.18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
Tabel 3.19 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	71
Tabel 3.20 Perbandingan Data Kinerja	73
Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi	74
Tabel 3.22 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025	75
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD	77
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional	79
Tabel 3.25 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi	80
Tabel 3.26 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
Tabel 3.27 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	82
Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025	83
Tabel 3.29 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2022	26
Gambar 2.1 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2022	41
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022, 2023, 2024, 2025	54
Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Sangat Tinggi Selama Tahun 2022–2025	66
Gambar 3.2 Grafik Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Sangat Tinggi Selama Tahun 2022–2025	76



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja dalam LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi organisasi, tujuan, dan sasaran strategis melalui pengukuran kinerja yang transparan. LKJIP menyajikan analisis pencapaian target, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, yang merupakan bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementerian PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Kementerian PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan tidak hanya mencakup pencapaian output, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

dengan pengukuran perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan diatur dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif, susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- A. Sekretaris Daerah;
- B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Bagian Hukum.
- C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- D. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Organisasi;
 - 2. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Fasilitasi Pimpinan
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan

- c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
- E. Staf Ahli; dan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan

Sekretaris Daerah mempunyai tugas menyusun kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur, pemantauan dan evaluasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b. Menyusun perencanaan pemerintahan Kabupaten Seruyan;
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Mengkoordinir staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan pada Setda dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
- f. Pembinaan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti pengumpulan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- g. Pengkoordinasian perumusan Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintahan Kabupaten;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- j. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- k. Pembinaan administrasi organisasi dan aparatur pemerintahan daerah;

- l. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

1.2.2 Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka uraian tugas Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan dan program di Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan

h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

(1) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pengkoordinasian kebijakan daerah, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerja Sama dan Otonomi Daerah. Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan Otonomi Daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerja Sama dan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerja Sama dan Otonomi Daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerja Sama dan Otonomi Daerah;

- g. Penggordinasian penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
- h. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan. Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor lain yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- e. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi. Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Hukum;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perundangundangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.2.3 Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, dan Administrasi Pembangunan;
- f. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian dan sumber daya alam. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi permasalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA);
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pelaporan. Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah;
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pelaporan;
- d. penyiapan bahan pengkoordinasian capaian target kinerja indeks pembangunan manusia
- e. penyiapan bahan pengkoordinasian capaian target kinerja gini ratio;
- f. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pelaporan;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pelaporan;
- h. pengendalian program swasta terhadap program pemerintah;
- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

(3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ)

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.2.4 Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- b. Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Organisasi;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di Bidang Organisasi;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Organisasi;
- g. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- h. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(1) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana,

dan kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan kinerja perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
- f. Perumusan, perencanaan, monitoring dan evaluasi program kerja bagian organisasi;
- g. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. fasilitasi pengadministrasian keuangan Sekretariat Daerah;
- c. fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan pengadministrasian Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah;
- d. fasilitasi administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. fasilitasi Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
- f. perumusan, perencanaan, monitoring dan evaluasi program kerja Bagian Umum
- g. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
Bagian Umum, terdiri atas :

(a) Sub Bagian Fasilitasi Pimpinan

Subbagian Fasilitasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Sub Bagian Fasilitasi Pimpinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) merumuskan dan merencanakan program kerja pada Subbagian Fasilitasi Pimpinan;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;
- d) mengoordinasikan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan rumah tangga pimpinan;
- e) menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(b) Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada sub bagian Keuangan;
- b) Melaksanakan pengoordinasian Keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;
- c) Melaksanakan administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;
- d) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(c) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan Administrasi Umum dilingkungan Sekretariat Daerah;
- c) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;
- d) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;
- e) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;

- f) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. Fasilitasi pelaksanaan keprotokolan pimpinan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan komunikasi pimpinan internal ataupun eksternal instansi;
- d. Pengkoordinasian pendokumentasian kegiatan pimpinan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- f. Perumusan, perencanaan, monitoring dan evaluasi program kerja bagian protokol dan komunikasi pimpinan;
- g. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(a) Sub Bagian Protokol

Subbagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Subbagian Protokol mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan keprotokolan;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan pimpinan
- c) Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah;
- d) Menyusun rencana kegiatan subbagian protokol;
- e) Menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

Sub bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan Komunikasi Pimpinan;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
- c) Menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d) Menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- e) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

Subbagian Dokumentasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan Dokumentasi Pimpinan;
- b) Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan Bahan Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c) Melaksanakan Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d) Mengarsipkan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e) Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.2.5 KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN SERTA TUGAS STAF AHLI

Jumlah dan pembidangan Staf Ahli Bupati Seruyan terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi berkoordinasi dengan Sekda.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan hubungan kerja konsultatif berupa pemberian pendapat lisan dan /atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merencanakan dan merumuskan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah berdasarkan data dan informasi dari Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan hubungan kerja kolegial melalui musyawarah, kelompok diskusi (group discussion/GD) berupa round table discussion (RTD)/focus group discussion (FGD)/seminar/ lokakarya/kegiatan sejenis dan analisis untuk mendapatkan bahan penyusunan makalah kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief);
- d. Melaksanakan hubungan kerja koordinatif dalam kegiatan penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Program Kerja Pemerintahan, pengintegrasian rencana program Perangkat Daerah, penelitian pengembangan, dan pembentukan tim kerja Perangkat Daerah;
- e. Mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya, sekaligus membantu Bupati untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud; dan
- f. Mempunyai tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengembangan, peningkatan perekonomian dan pengelolaan keuangan serta pembangunan pemerintah daerah dan

bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrasi berkordinasi dengan Sekretaris Daerah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Pemelaksanakan hubungan kerja konsultatif berupa pemberian pendapat lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merencanakan dan merumuskan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah berdasarkan data dan informasi dari Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan hubungan kerja kolegal melalui musyawarah, kelompok diskusi (group discussion/GD) berupa round table discussion (RTD)/focus group discussion (FGD)/seminar/ lokakarya/kegiatan sejenis dan analisis untuk mendapatkan bahan penyusunan makalah kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief);
- d. Melaksanakan hubungan kerja koordinatif dalam kegiatan penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Program Kerja Pemerintahan, pengintegrasian rencana program Perangkat Daerah, penelitian pengembangan, dan pembentukan tim kerja Perangkat Daerah;
- e. Mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya, sekaligus membantu Bupati untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud; dan
- f. Mempunyai tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan

kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi berkoordinasi kepada Sekda.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan hubungan kerja konsultatif berupa pemberian pendapat lisan dan /atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merencanakan dan merumuskan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan daerah berdasarkan data dan informasi dari Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan hubungan kerja kolegial melalui musyawarah, kelompok diskusi (group discussion/GD) berupa round table discussion (RTD)/focus group discussion (FGD)/seminar/ lokakarya/kegiatan sejenis dan analisis untuk mendapatkan bahan penyusunan makalah kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief);
- d. Melaksanakan hubungan kerja koordinatif dalam kegiatan penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Program Kerja Pemerintahan, pengintegrasian rencana program Perangkat Daerah, penelitian pengembangan, dan pembentukan tim kerja Perangkat Daerah;
- e. Mewakili Bupati dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang dan kewenangannya, sekaligus membantu Bupati untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan dimaksud; dan
- f. Mempunyai tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.6 Kepegawaian dan Eselon

- a. Pejabat Aparatur Sipil Negara yang ada pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Tinggi Pratama.
- c. Asisten dan Staf Ahli merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- d. Kepala Bagian merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- e. Kepala subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- f. Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. Jabatan Pelaksana merupakan Pegawai Negeri Sipil selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.

1.2.7 Kelompok Jabatan

(1) Jabatan Fungsional

(a) Pasal 34

1. Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Bupati dapat menetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian;
2. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Pasal 35

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
4. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

(2) Jabatan Pelaksana

- a. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam jabatan Pelaksana.
- b. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

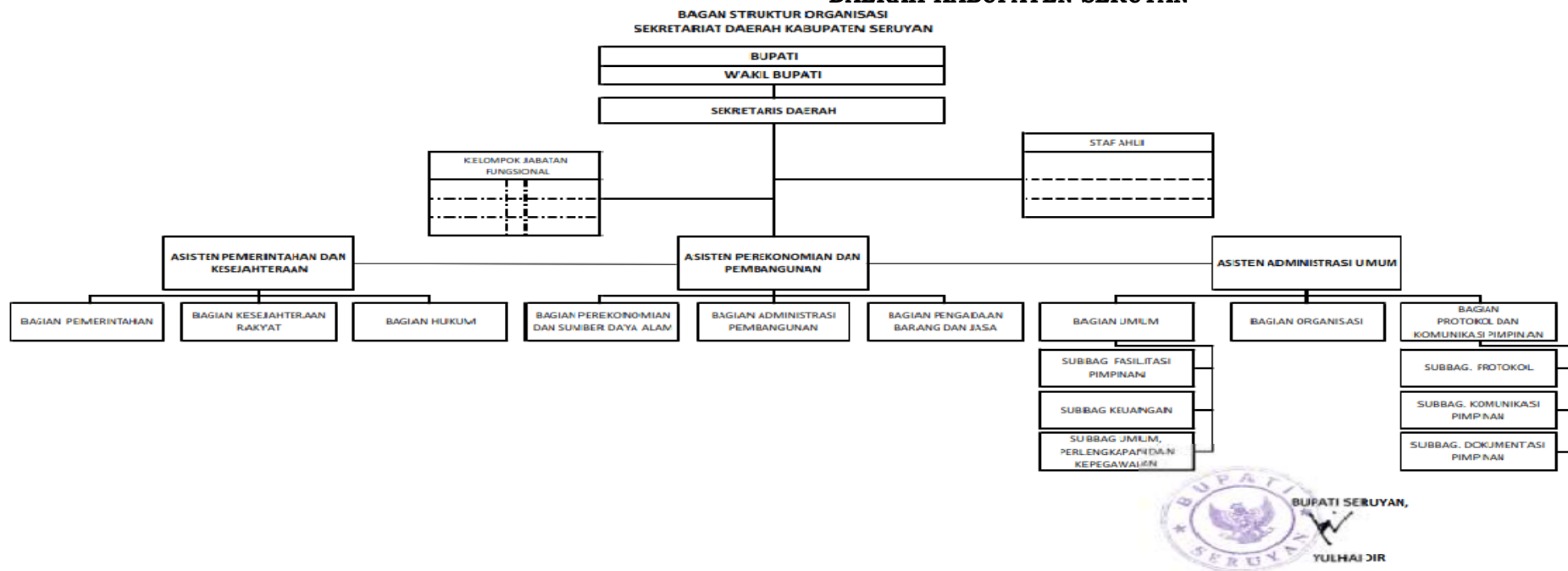
- c. Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- e. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

1.2.8 Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam Lingkungan Sekretariat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

GAMBAR 1.1
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TANGGAL 20 September 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN



1.3 Sumber Daya Manusia

Pencapaian Kinerja sasaran Sekretariat Daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Sumber Daya baik berupa aparatur, sarana Prasarana maupun anggaran. Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada table 1.3

Table 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

Jabatan	Jumlah
PNS	
Sekretaris Daerah	1 Orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang
Asisten Administrasi Umum	1 Orang
Staf Ahli	3 Orang
Kepala Bagian	9 Orang
Kepala Sub Bagian	6 Orang
Fungsional Tertentu	33 Orang
Fungsional Umum	57 Orang
PPPK	18 Orang
PPPK PW	51 Orang
Total	180 Orang

Table 1.2
Komposisi PNS dan P3K Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	16 Orang
III	80 Orang
II	13 Orang
I	1 Orang
Total	110 Orang

Table 1.3
Komposisi PNS dan P3K Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
II	5 Orang
III	9 Orang
IV	6 Orang
Fungsional tertentu	22 Orang

Eselon	Jumlah
Fungsional Umum	56 Orang
PPPK	4 Orang
Total	102 Orang

Table 1.4

Komposisi PNS dan P3K Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah
S2	24 Orang
S1	35 Orang
D3/DIV	9 Orang
SMA/SMK	28 Orang
SMP	1 Orang
SD	1 Orang
PPPK S1	2 Orang
PPPK D3	2 Orang
Total	102 Orang

Table 1.5

Komposisi Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah
S2	2 Orang
S1	22 Orang
D3	3 Orang
SMA/SMK	40 Orang
SMP	1 Orang
Total	68 Orang

Table 1.6

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Organisasi	Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
	IV	III	II	I		
Sekretaris Daerah	1					1 Orang
Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan	1					1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1					1 Orang
Asisten Administrasi Umum	1					1 Orang
Staf Ahli	1					3 Orang
Bagian Pemerintahan						
Kepala Bagian	1					1 Orang

Organisasi	Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
	IV	III	II	I		
Fungsional Tertentu		2				2 Orang
Fungsional Umum			5			5 Orang
Staf Non PNS					6	6 Orang
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
Kepala Bagian	1					1 Orang
Fungsional Tertentu /Subbag		3				3 Orang
Fungsional Umum		1				1 Orang
Staf Non PNS						
Bagian Hukum						
Kepala Bagian	1					1 Orang
Fungsional Tertentu		3				3 Orang
Staf PNS (fungsional dan Pelaksana)		3				3 Orang
Staf Non PNS					6	6 Orang
Bagian Administrasi Pembangunan						
Kepala Bagian		1				1 Orang
Fungsional Tertentu		3				3 Orang
Staf PNS (fungsional dan Pelaksana)		1	3			4 Orang
Staf Non PNS					6	6 Orang
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
Kepala Bagian	1					1 Orang
Fungsional Tertentu		9				9 Orang
Staf Pns (fungsional dan Pelaksana)			2			2 Orang
Staf Non PNS					9	9 Orang
Bagian Umum						
Kepala Bagian	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian		3				3 Orang
Staf Pns (fungsional dan Pelaksana)		8	10			18 Orang
Staf Non PNS					38	38 Orang

Organisasi	Golongan				Tenaga Kontrak	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bagian Organisasi						
Kepala Bagian	1					1 Orang
Fungsional Tertentu		3				3 Orang
Staf PNS (fungsional dan Pelaksana)			1	3		4 Orang
Staf Non PNS					4	4 Orang
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
Kepala Bagian	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian		2				2 Orang
Staf PNS (fungsional dan Pelaksana)		4	6	1		11 Orang
Staf Non PNS					3	3 Orang

1.4 Isu Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun terdapat permasalahan-permasalahan atau kendala pada pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang sangat berpengaruh pada pencapaian keberhasilan pembangunan Sekretariat Daerah, ialah sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya capaian kinerja pemerintah daerah;
- b. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
- c. Kurangnya motivasi kerja aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kinerja;
- d. Kurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan belum optimal;
- f. Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka sangat diperlukan analisa isu-isu strategis karena merupakan hal yang sangat penting dan juga sangat membantu dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa yang akan datang dan apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya ada beberapa isu-isu strategis yang perlu diperhatikan agar lebih terarah dan berkelanjutan ialah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Optimalisasi Kinerja BLUD dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Optimalisasi Restrukturisasi organisasi dan *management public*
- d. Optimalisasi Efektifitas kelembagaan tugas dan fungsi perangkat daerah belum optimal
- e. Optimalisasi Manajemen Perencanaan Keuangan dan aset Daerah
- f. Optimalisasi Kinerja Perangkat daerah

Berangkat dari berbagai permasalahan dan Isu Strategis terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah maka dapat dilihat melalui tabel 1.7 sebagai berikut :

Tabel 1.7

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Seruyan

Topuksi	Isu Strategis
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Fungsi 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah ; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas fungsinya	1. Optimalisasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Optimalisasi Kinerja BUMD, BLUD dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Optimalisasi Restrukturisasi organisasi dan management public 4. Optimalisasi Efektifitas kelembagaan tugas dan fungsi perangkat daerah belum optimal 5. Optimalisasi Manajemen Perencanaan Keuangan dan aset Daerah Optimalisasi Kinerja Perangkat daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026, perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan disusun secara sistematis dan terintegrasi melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026. RENSTRA tersebut memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan selama periode tiga tahun kedepan (2024–2026) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026.

Dalam konteks penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), RENSTRA berfungsi sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pengukuran kinerja, sekaligus sebagai alat untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, sehingga mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil di Kabupaten Seruyan.

Dalam rangka menjamin keterpaduan dan efektivitas perencanaan, dukungan serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sangat diharapkan. Partisipasi tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, sehingga mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan

pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Seruyan secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja. Tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Seruyan dalam RPD tahun 2024-2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan.

RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 dengan Visi : “Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2024-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan berperan aktif dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan Tujuan ke 3 (tiga) yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dengan Sasaran ke 6 (Enam) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Oleh Karena itu maka Sekretariat Daerah selaku pelaksana tugas desentralisasi dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai.

Adapun Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai upaya mencapai Tujuan maka diturunkan kedalam 3 (tiga) sasaran yang terdiri sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Capaian Pelaksana Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Meningkatnya Capaian Pelaksana Urusan Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang ditetapkan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD periode 2024-2026 dapat dilihat melalui tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan ke 3 RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indek Reformasi Birokrasi			B (62,25)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
			Sasaram ke 6 RPD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	B (63,81)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase pelaporan LHKPN			n/a	100%	100%	100%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (62,60)	B (67,50)	B (69,00)	BB (70,50)
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD			Tinggi (2,7954)	Tinggi (2,9562)	Tinggi (2,9890)	Sangat Tinggi (3,0256)
			Meningkatnya Capaian Pelaksana Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	103%	100%	100%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	100%	100%	100%

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinir dalam pelaksanaan tugas, memberi pelayanan secara administratif dan pembinaan aparatur, serta memantau dan mengevaluasi Perangkat Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah membuat perjanjian kinerja, sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkenan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan dan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Tujuannya disusunnya Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Sekretaris Daerah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

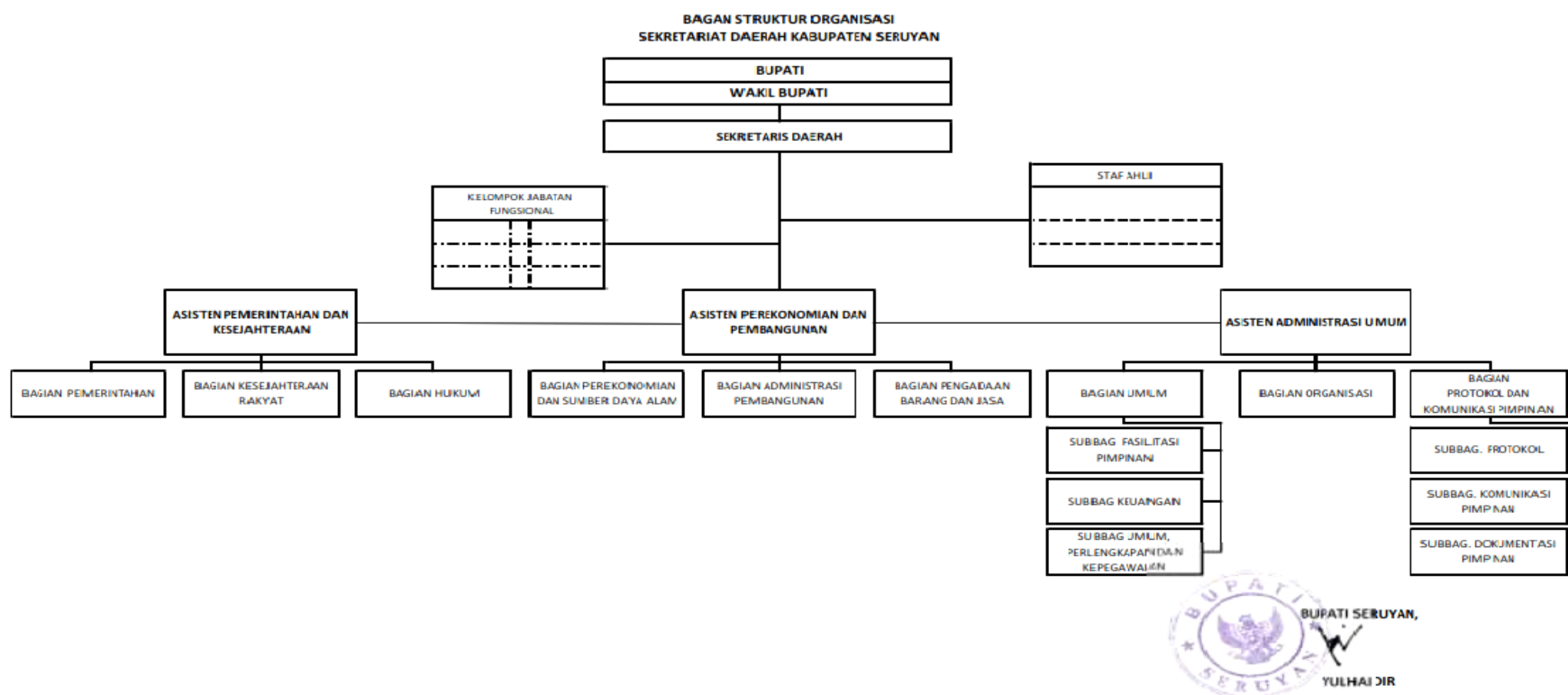
2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi;
 2. Bagian Umum;
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - a) Kepala Sub Bagian Protokol;
 - b) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
- e. Staf Ahli;
- f. Kepegawaian dan Eselon;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Tata Kerja.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada gambar (terlampir)

GAMBAR 2.1
PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 18 TAHUN 2022 TANGGAL 20
SEPTEMBER 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN



TABEL 2.2 PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Tahun : 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan		Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
					Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
						Fasilitasi Bantuan Hukum
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
3.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
						Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN

2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai misi organisasi, tujuan, dan sasaran strategis melalui pengukuran kinerja yang transparan. LKjIP menyajikan analisis pencapaian target, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, yang merupakan bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kementerian PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Kementerian PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan tidak hanya mencakup pencapaian output, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang diinginkan oleh masyarakat.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dengan pengukuran perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%
3.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	80%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta menjadi dasar dalam penyusunan kontrak kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas target kinerjanya masing-masing bersumber dari data yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan. Cara pengukuran hasil capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Presentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berikut adalah hasil pengukuran perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang telah dicapai tahun 2025 dan dilakukan analisis capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C (49,50)	B (69,00)	C (43,20)	62,60	Rendah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori Capaian
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	90%	100%	90%	90%	Tinggi
3	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	92,31%	80%	92,31%	115,39%	Sangat Tinggi (melampaui target sebesar 15,39%)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Tabel 3.3 menyajikan capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang ditetapkan berdasarkan baseline realisasi kinerja tahun sebelumnya (2024), definisi operasional indikator, serta pertimbangan peran koordinatif Sekretariat Daerah. Pada Sasaran Strategis 1, indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi akuntabilitas kinerja) memiliki baseline tahun 2024 sebesar C (49,50), sehingga target 2025 ditetapkan B (69,00) untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas melalui pembinaan Setda, namun realisasi masih C (43,20) atau 62,60%. Pada Sasaran Strategis 2, indikator persentase urusan kesejahteraan rakyat berkategori sangat tinggi (proporsi urusan dengan kinerja tertinggi) memiliki baseline 90%, sehingga target ditetapkan 100% untuk

optimalisasi capaian melalui koordinasi Setda, dengan realisasi tetap 90% (kategori tinggi). Pada Sasaran Strategis 3, indikator persentase urusan perekonomian dan pembangunan berkategori sangat tinggi memiliki baseline 92,31%, sehingga target ditetapkan 80% secara realistis berdasarkan kapasitas pelaksanaan, dan terealisasi 92,31% (115,39%) atau melampaui target. Baseline pada Sasaran Strategis 2 dan 3 disusun berdasarkan penyesuaian indikator kinerja, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian LKjIP Tahun 2024.

3.1.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah

Adapun analisis capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut:

(1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.4
Perbandingan Data Kinerja

No	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2025	Data Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	C (43,20)	62,60

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\begin{aligned} \text{Presentase Capaian Kinerja} &= \frac{43,20}{69,00} \times 100\% \\ &= 62,60\% \end{aligned}$$

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	C (43,20)	62,60	Rendah

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\begin{aligned} \text{Presentase Capaian Kinerja} &= \frac{43,20}{69,00} \times 100\% \\ &= 62,60\% \end{aligned}$$

*Skala Kategori Capaian :
51% ≤ 65% = Rendah

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5, indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 ditargetkan mencapai kategori B dengan nilai 69,00, namun realisasi kinerja yang dicapai berada pada kategori C dengan nilai 43,20. Perhitungan persentase capaian kinerja menunjukkan nilai sebesar 62,60%, yang diperoleh dari realisasi sebesar 43,20 (kategori C) dibagi dengan target 69,00 (kategori B). Dengan capaian tersebut, kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 termasuk dalam kategori capaian rendah, sehingga realisasi kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

(2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi											
		Th. 2022 (n-3)			Th. 2023 (n-2)			Th. 2024 (n-1)			Th. 2025 (n)		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	D (0,00)	0	(B) 67,00	D (0,00)	0	(B) 64,11	C (49,50)	77,21	(B) 69,00	C (43,20)	62,60

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.6 tentang perbandingan realisasi dan capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022–2025, terlihat adanya dinamika kinerja yang menunjukkan pola peningkatan dan penurunan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja.

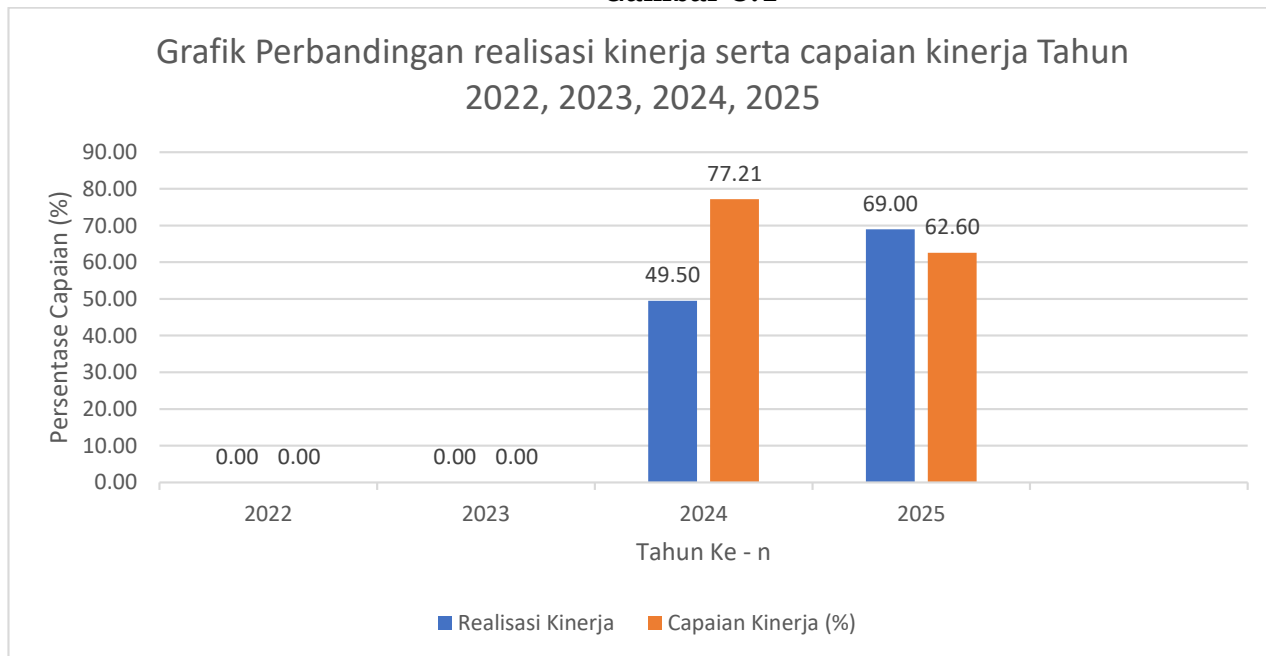
Pada Tahun 2022 dan 2023, nilai SAKIP masih berada pada kategori D (0,00) dengan capaian kinerja 0%, yang mengindikasikan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja belum berjalan optimal, terutama pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporan.

Memasuki Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dengan capaian nilai C (49,50) dan capaian kinerja 77,21%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam siklus manajemen kinerja, khususnya pada penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, serta pelaporan kinerja yang lebih terstruktur.

Namun demikian, pada Tahun 2025 nilai SAKIP tetap berada pada kategori C, tetapi mengalami penurunan nilai dalam kategori yang sama (C) nilai menjadi 43,20 dengan capaian kinerja 62,60%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka sistem sudah terbentuk, masih terdapat kelemahan pada konsistensi implementasi, kualitas pengukuran kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja.

Berikut disajikan grafik Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022–2025 :

Gambar 3.1



Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1, Grafik ini menunjukkan perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP dari tahun 2022 hingga 2025, mulai dari nilai SAKIP masih berada pada kategori D nilai 0,00 dengan capaian kinerja 0% pada tahun 2022–2023, meningkat menjadi kategori C nilai 49,50 dengan capaian kinerja 77,21% pada tahun 2024, dan menurun menjadi kategori C nilai 43,20 dengan capaian kinerja 62,60% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, grafik menggambarkan adanya perbaikan kinerja, meski konsistensi perlu ditingkatkan.

(3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC (55)	C (43,20)	78,54

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\text{Rumus : Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemajuan} &= \frac{43,20}{55} \times 100\% \\ &= 78,54\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2025, nilai SAKIP Sekretariat Daerah mencapai 43,20 (kategori C), masih di bawah target akhir RPJMD sebesar 55 (kategori CC). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pada perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja agar target RPJMD tercapai.

(4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi/Rata-Rata Nasional
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C (43,20)	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.6, Nilai SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori C dengan nilai 43,20. Perbandingan dengan realisasi atau rata-rata nasional saat ini belum tersedia (N/A).

(5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.9
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

No	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Hal yang Dilakukan/ Solusi
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	C (43,20)	62,60	1. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil kinerja yang berkelanjutan (belum optimal outcome oriented) (Sumber: LHE SAKIP Setda 2024 – Inspektorat) 2. Penerapan cascading kinerja belum optimal dan belum konsisten hingga level individu (Sumber: LHE SAKIP Setda 2024 – Inspektorat)	1. Menyempurnakan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, Rencana Aksi) agar berbasis outcome dan terintegrasi antar level (PIC: Bagian Organisasi Setda, waktu: Triwulan II 2026) 2. Melakukan reviu dan penyempurnaan cascading kinerja hingga level jabatan serta integrasi dengan SKP pegawai (PIC: Bagian Organisasi Setda & BKPSDM, waktu: Triwulan II 2026) 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

					3. Monitoring dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan (Sumber: LHE SAKIP Setda 2024 – Inspektorat) 4. Masih terdapat indikator kinerja yang belum dianalisis secara mendalam (analisis capaian belum optimal) (Sumber: LHE SAKIP Setda 2024 – Inspektorat) 5. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan belum optimal (Sumber: LHE SAKIP Setda 2024 – Inspektorat)	setiap triwulan disertai laporan hasil monev (PIC: Bagian Organisasi Setda, waktu: setiap triwulan) 4. Menyusun analisis capaian kinerja berbasis data dan eviden pada setiap indikator, termasuk identifikasi faktor keberhasilan dan kendala (PIC: Bagian Organisasi Setda, waktu: Triwulan II 2026) 5. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dengan tingkat keterlaksanaan minimal 80% (PIC: Bagian Organisasi Setda & seluruh Bagian Setda, waktu: Triwulan III 2026)
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

(6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator kinerja	Sumber Daya	Analisis Efisiensi
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Anggaran, SDM (Capaian Kinerja)	Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, dengan rumus efisiensi (capaian kinerja ÷ realisasi anggaran) × 100 , diperoleh nilai efisiensi sebesar 75,43%. Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 82,99% menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi, namun capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar 62,60 (kategori C) masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya berada pada kategori cukup efisien, tetapi belum diikuti oleh peningkatan kinerja yang sebanding, sehingga masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, pengendalian pelaksanaan, dan keterkaitan antara anggaran dan capaian kinerja.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.10, analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran yang digunakan.

Dari sisi anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merealisasikan anggaran sebesar Rp36.955.107.286,50 atau 82,99% dari total pagu sebesar Rp44.529.560.674,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran telah berjalan cukup baik dan relatif efisien dari sisi penggunaan dana.

Sementara itu, capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah sebesar 62,60% masih lebih rendah dibandingkan tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan perhitungan efisiensi, diperoleh nilai sebesar 75,43% yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya berada pada kategori cukup efisien, namun belum optimal.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara finansial penggunaan anggaran telah cukup efisien, efektivitas dalam menghasilkan kinerja masih perlu ditingkatkan. Ketidakseimbangan antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja menunjukkan perlunya penguatan pada aspek perencanaan kinerja, pengendalian pelaksanaan program, serta peningkatan keterkaitan antara output kegiatan dan indikator kinerja.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efisiensi pada periode berikutnya diperlukan perbaikan menyeluruh pada proses perencanaan berbasis kinerja agar penggunaan sumber daya dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih optimal dan terukur.

(7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.11

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator kinerja	Program/Kegiatan	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendukung pencapaian sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja melalui kegiatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Realisasi anggaran sebesar 82,99% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran, namun capaian kinerja 62,60% (kategori C) menunjukkan bahwa efektivitas program belum optimal. Hal ini disebabkan belum optimalnya implementasi SAKIP secara menyeluruh, sehingga output kegiatan belum sepenuhnya menghasilkan outcome yang diharapkan.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.11, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja.

Realisasi anggaran sebesar 82,99% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan telah berjalan cukup efisien. Namun demikian, capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar 62,60% dengan kategori C menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja masih belum optimal.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tingkat penyerapan anggaran dan capaian kinerja yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya implementasi SAKIP secara menyeluruh, terutama pada aspek perencanaan berbasis kinerja, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja, sehingga output kegiatan belum sepenuhnya menghasilkan outcome yang diharapkan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan pada seluruh tahapan siklus SAKIP agar pelaksanaan program dapat lebih efektif dalam mendukung peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya.

3.1.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Indikator “Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi” diukur berdasarkan capaian indikator subkegiatan (output) yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Menghitung capaian kinerja masing-masing subkegiatan dengan rumus:
$$\text{Persentase Capaian Kinerja Subkegiatan} = (\text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$
- Menentukan kategori “sangat tinggi”, yaitu subkegiatan yang memiliki capaian kinerja $\geq 90\%$ berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja.

- Menghitung persentase subkegiatan yang mencapai kategori “sangat tinggi” dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = (\text{Jumlah subkegiatan kategori "sangat tinggi"} / \text{Total subkegiatan}) \times 100\%$$

sedangkan untuk aspek anggaran digunakan rumus:

- $\text{Persentase Realisasi Anggaran} = (\text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran}) \times 100\%$.

Sumber data berasal dari laporan hasil evaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang disajikan pada Lampiran (Tabel E-81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan). Adapun analisis capaian kinerja Sasaran Strategis 2 disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang mengacu pada data capaian kinerja program (outcome) sebagaimana tercantum dalam Lampiran tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.12
Perbandingan Data Kinerja

No	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2025	Data Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	90%	90%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\begin{aligned} \text{Presentase Capaian Kinerja} &= \frac{90}{100} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	90%	90%	Tinggi

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase Capaian Kinerja} &= \frac{90}{100} \times 100\% \\
 &= 90\%
 \end{aligned}$$

*Skala Kategori Capaian :
76% ≤ 90% = Tinggi

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Tabel 3.12 dan Tabel 3.13, Indikator persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Dengan target sebesar 100%, realisasi pada tahun 2025 mencapai 90%, sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 adalah 90%, yang termasuk dalam kategori Tinggi, sesuai dengan skala kategori capaian (76% ≤ 90% = Tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada Tahun 2025 telah mencapai sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target maksimal 100%. Secara umum, kinerja yang dicapai mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan cukup efektif dan terarah.

(2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi											
		Th. 2022 (n-3)			Th. 2023 (n-2)			Th. 2024 (n-1)			Th. 2025 (n)		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	N/A	71,42%	-	N/A	70%	-	100%	90%	90	100%	90%	90

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.14 tentang perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022–2025 pada indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Memiliki Kategori Nilai Sangat Tinggi, perlu dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dasar Perjanjian Kinerja (PK) antara periode Tahun 2022–2023 dan Tahun 2024–2025. Perbedaan dasar Perjanjian Kinerja (PK) tersebut mengakibatkan indikator kinerja yang digunakan pada masing-masing periode berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, target pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 dinyatakan N/A (*Not Applicable*) karena masih mengacu pada PK yang berbeda dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang berlaku pada Tahun 2025. Dengan demikian, pada Tahun 2022–2023 tidak dapat dihitung capaian kinerja terhadap target sebagaimana pada Tahun 2024–2025, sehingga data

capaian kinerja tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung karena menggunakan indikator dan parameter pengukuran yang berbeda. Perbandingan yang dapat dilakukan pada periode tersebut hanya sebatas pada realisasi kinerja secara umum.

Adapun realisasi pada Tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 71,42% dan 70%, yang menggambarkan kondisi kinerja sesuai indikator yang berlaku pada saat itu.

Sejak Tahun 2024, indikator kinerja telah disesuaikan berdasarkan dasar Perjanjian Kinerja (PK) yang baru dengan target sebesar 100%. Pada Tahun 2024, realisasi mencapai 90% dengan capaian kinerja sebesar 90%, dan capaian tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 90% terhadap target 100%, sehingga capaian kinerja tetap sebesar 90%.

Dengan demikian, analisis tren kinerja yang relevan dan dapat dibandingkan secara metodologis adalah pada periode Tahun 2024–2025, yang menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan yang lebih optimal agar capaian kinerja dapat lebih mendekati target maksimal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut disajikan grafik capaian indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi selama tahun 2022–2025 :

Gambar 3.2



Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Gambar 3.2, grafik capaian indikator Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan kinerja. Pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi masing-masing sebesar 71,42% dan 70%. Selanjutnya pada Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 90% dengan capaian kinerja 90% dan dapat dipertahankan pada Tahun 2025 dengan realisasi 90% dan capaian kinerja 90%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam dua tahun terakhir.

(3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan(%)
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	90%	90%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\text{Rumus : Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemajuan} &= \frac{90}{100} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 3.15, indikator kinerja persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 90% terhadap target akhir RPJMD sebesar 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja hingga Tahun 2025 telah mendekati target jangka menengah yang ditetapkan, dengan selisih (gap) sebesar 10% yang masih perlu dipenuhi.

Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar subkegiatan telah mencapai kategori “sangat tinggi”, namun belum seluruhnya memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, meskipun kinerja berada pada kategori tinggi, masih diperlukan upaya percepatan

dan pemerataan capaian kinerja antar subkegiatan agar target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

(4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi/Rata-Rata Nasional
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	90%	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.16, realisasi indikator persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi pada Tahun 2025 sebesar 90%.

Perbandingan dengan standar nasional atau rata-rata nasional belum dapat dilakukan karena tidak tersedia indikator pembanding yang bersifat nasional dengan definisi dan metode pengukuran yang sama, khususnya yang berbasis capaian kinerja subkegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah.

(5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.17
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

No	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Hal yang Dilakukan/ Solusi
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	90%	90%	Capaian sebesar 90% menunjukkan kinerja dalam kategori tinggi, namun belum mencapai target 100%. Selisih 10% disebabkan oleh masih adanya subkegiatan yang belum mencapai kategori “sangat tinggi” ($\geq 90\%$), yang dipengaruhi oleh belum optimalnya perencanaan target kinerja, konsistensi pelaksanaan kegiatan, serta kualitas monitoring dan evaluasi kinerja. Selain itu, kualitas pelaporan capaian kinerja pada beberapa subkegiatan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.	1. Melakukan evaluasi capaian kinerja pada seluruh subkegiatan yang belum mencapai $\geq 90\%$ secara triwulanan; 2. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui penajaman target yang lebih realistis dan terukur; 3. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; 4. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja subkegiatan melalui pendampingan internal; 5. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antar bagian dalam pengendalian

No	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Hal yang Dilakukan/ Solusi
						pelaksanaan kegiatan.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

(6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator kinerja	Sumber Daya	Analisis Efisiensi
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Anggaran, SDM, sarana/prasarana, dan waktu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Dengan realisasi anggaran sebesar 92,76%, program mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 90% (kategori Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah mendukung pencapaian kinerja secara optimal, meskipun masih terdapat ruang perbaikan agar penggunaan anggaran dapat lebih selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.18, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, realisasi anggaran sebesar 92,76% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 90% dalam kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya, yang meliputi anggaran, SDM,

sarana/prasarana, serta waktu pelaksanaan, telah berjalan cukup efisien dan mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih antara tingkat serapan anggaran dan capaian kinerja, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya agar lebih selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

(7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.19
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator kinerja	Program/Kegiatan	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
1	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	Capaian sebesar 90% (kategori Tinggi) menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif. Keberhasilan didukung oleh optimalnya peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelaksanaan program, serta pemanfaatan sumber daya berupa anggaran, SDM, sarana/prasarana, dan waktu secara cukup efisien. Namun demikian, target 100% belum sepenuhnya tercapai sehingga masih diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan dan kualitas pengendalian kinerja.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.19, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator dengan realisasi sebesar 90% (kategori Tinggi). Keberhasilan capaian didukung oleh optimalnya peran Sekretariat Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelaksanaan program.

Pemanfaatan sumber daya secara cukup efisien turut menunjang pencapaian tersebut. Namun demikian, karena target 100% belum sepenuhnya tercapai, diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengendalian program agar kontribusi program terhadap indikator kinerja dapat lebih maksimal.

3.1.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan

Indikator “Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi” diukur berdasarkan capaian indikator subkegiatan (output) yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pengukuran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Menghitung capaian kinerja masing-masing subkegiatan dengan rumus:
Persentase Capaian Kinerja Subkegiatan = (Realisasi Kinerja / Target Kinerja) × 100%
- Menentukan kategori “sangat tinggi”, yaitu subkegiatan yang memiliki capaian kinerja $\geq 90\%$ berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja.
- Menghitung persentase subkegiatan yang mencapai kategori “sangat tinggi” dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = (\text{Jumlah subkegiatan kategori "sangat tinggi"} / \text{Total subkegiatan}) \times 100\%$$

sedangkan untuk aspek anggaran digunakan rumus:

- *Persentase Realisasi Anggaran* = $(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Target Anggaran}) \times 100\%$.

Sumber data berasal dari laporan hasil evaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan yang disajikan pada Lampiran (Tabel E-81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan). Adapun analisis capaian kinerja Sasaran Strategis 3 disusun berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang mengacu pada data capaian kinerja program (outcome) sebagaimana tercantum dalam Lampiran tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.20
Perbandingan Data Kinerja

No	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2025	Data Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian (%)
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	80%	92,31%	115,39%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase Capaian Kinerja} &= \frac{92,31}{80} \times 100\% \\
 &= 115,39\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	80%	92,31%	115,39%	Sangat Tinggi/ melampaui target sebesar 15,39%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase Capaian Kinerja} &= \frac{92,31}{80} \times 100\% \\
 &= 115,39\%
 \end{aligned}$$

*Skala Kategori Capaian :
91% ≤ 100% = Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Tabel 3.20 dan Tabel 3.21, indikator persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi menunjukkan capaian kinerja sebesar 115,39%, sehingga termasuk dalam kategori sangat tinggi dan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 92,31% terhadap target 80%, yang menunjukkan bahwa jumlah subkegiatan yang mencapai kategori “sangat tinggi” (≥90%) melebihi proporsi yang ditargetkan.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar subkegiatan telah mencapai kinerja optimal dan melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, pelaksanaan urusan perekonomian dan

pembangunan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

(2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022, 2023, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi											
		Th. 2022 (n-3)			Th. 2023 (n-2)			Th. 2024 (n-1)			Th. 2025 (n)		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	N/A	100%	-	N/A	76,92%	-	80%	92,31%	115,39	80%	92,31%	115,39

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.22, indikator Persentase Pelaksanaan Urusan Perekonomian dan Pembangunan yang Memiliki Kategori Nilai Sangat Tinggi menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 target dinyatakan N/A (*Not Applicable*) karena masih mengacu pada dasar Perjanjian Kinerja (PK) yang berbeda dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang berlaku pada Tahun 2024–2025. Oleh karena itu, pada periode tersebut tidak dapat dihitung capaian kinerja terhadap target, dan perbandingan hanya dapat dilakukan dari sisi realisasi.

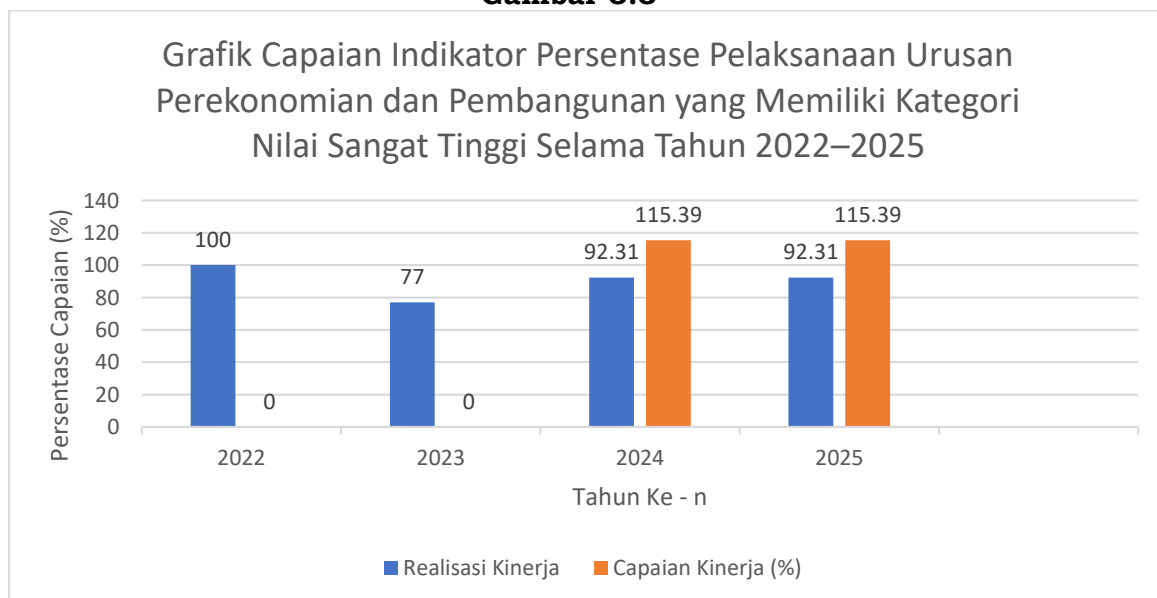
Dari sisi realisasi, Tahun 2022 tercatat sebesar 100%, kemudian menurun pada Tahun 2023 menjadi 76,92%. Selanjutnya, sejak

penyesuaian indikator berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang baru pada Tahun 2024 dengan target sebesar 80%, realisasi meningkat menjadi 92,31% dengan capaian kinerja sebesar 115,39%. Capaian tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2025 dengan target yang sama sebesar 80% dan realisasi sebesar 92,31%, sehingga capaian kinerja tetap sebesar 115,39%.

Secara umum, apabila dilihat dari realisasi, terjadi fluktuasi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, kemudian peningkatan signifikan pada Tahun 2024 dan stabil pada Tahun 2025. Sementara itu, dari sisi capaian kinerja terhadap target, perbandingan yang relevan hanya dapat dilakukan pada Tahun 2024 dan 2025, yang menunjukkan kinerja sangat baik karena realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Secara umum, capaian dua tahun terakhir menunjukkan kondisi kinerja yang baik dan lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut disajikan grafik capaian indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi selama tahun 2022–2025 :

Gambar 3.3



Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Gambar 3.3, grafik capaian indikator Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi selama Tahun 2022–2025, terlihat bahwa kinerja mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan kondisi yang baik dalam dua tahun terakhir.

Pada Tahun 2022 capaian realisasi berada pada angka 100%. Selanjutnya pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 76,92%. Namun pada Tahun 2024 capaian realisasi kembali meningkat secara signifikan menjadi 92,31% dengan capaian kinerja 115,39 dan nilai tersebut dapat dipertahankan pada Tahun 2025 sebesar 92,31% dengan capaian kinerja 115,39.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah mengalami penurunan capaian realisasi pada Tahun 2023, kinerja berhasil diperbaiki pada Tahun 2024 dan tetap stabil hingga Tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan serta konsistensi dalam menjaga capaian kinerja pada periode terakhir.

(3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan(%)
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	80%	92,31%	115,39%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

$$\text{Rumus : Tingkat Kemajuan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kemajuan} &= \frac{92,31}{80} \times 100\% \\ &= 115,39\%\end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 3.23, indikator kinerja persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 115,39% terhadap target akhir RPJMD sebesar 80%.

Capaian ini mengindikasikan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang berarti proporsi subkegiatan yang mencapai kategori “sangat tinggi” lebih besar dari yang direncanakan.

Penetapan target sebesar 80% dalam RPJMD mencerminkan asumsi realistis terhadap kemampuan awal pelaksanaan program, sedangkan capaian sebesar 92,31% menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelaksanaan subkegiatan, perbaikan kualitas perencanaan dan pengendalian, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian, capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target, tetapi juga mencerminkan peningkatan kinerja yang melampaui ekspektasi perencanaan jangka menengah.

(4) Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi/Rata-Rata Nasional
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	92,31%	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.24, indikator kinerja Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi pada Tahun 2025 mencapai 92,31%. Data rata-rata nasional sebagai pembanding tidak tersedia (N/A), sehingga analisis perbandingan eksternal belum dapat dilakukan.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan telah berada pada kategori nilai sangat tinggi, yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan urusan yang berjalan dengan baik pada tingkat daerah.

(5) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.25
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

No	Indikator kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Hal yang Dilakukan/ Solusi
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	80%	92,31%	115,39%	Capaian realisasi sebesar 92,31% telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80%, dengan tingkat kemajuan mencapai 115,39%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi dan fasilitasi Sekretariat Daerah dalam pengendalian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan, serta optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Mempertahankan dan memperkuat mekanisme koordinasi dan pengendalian program, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, serta mendorong peningkatan capaian pada seluruh urusan agar dapat mencapai kategori sangat tinggi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

(6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.26
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator kinerja	Sumber Daya	Analisis Efisiensi
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Anggaran, SDM, sarana/prasarana, dan waktu	Program Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 85,16%, program mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,31% atau melampaui target 80%, sehingga mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang optimal.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.26, Program Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar 85,16% dari pagu Rp2.517.935.600, program tersebut mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,31% atau 115,39% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran, SDM, sarana/prasarana, dan waktu telah dilakukan secara efektif, sehingga dengan tingkat serapan anggaran yang tidak penuh tetap mampu menghasilkan kinerja di atas target.

(7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.27
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator kinerja	Program/Kegiatan	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
1	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	Program Perkonomian dan Pembangunan	Keberhasilan realisasi sebesar 92,31% dari target yang ditetapkan (80%) sehingga capaian kinerja yang didapat sebesar 115,39% dipengaruhi oleh efektivitas peran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian program. Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang meliputi anggaran, SDM, sarana/prasarana, dan waktu dilakukan secara efisien sehingga indikator kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Berdasarkan Tabel 3.27, Program Perekonomian dan Pembangunan berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi sebesar 92,31% dari target 80% sehingga capaian kinerja sebesar 115,39%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan berjalan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian yang efektif oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi pelaksanaan program dan mekanisme

pengawasan telah berjalan dengan baik sehingga target RPJMD dapat dicapai bahkan terlampaui.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025 realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.529.560.674	36.955.107.286,50	82,99
1.1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja PD	161.183.800	156.524.288	97,11
1.2	Administrasi Keuangan PD	16.594.263.954,87	15.852.524.162	95,53
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah PD	47.065.000	22.987.827	48,84
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.845.000	178.819.335	94,73
1.5	Administrasi Umum PD	6.510.891.750	4.616.646.644	70,91
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	3.585.347.250	3.399.907.000	94,83
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	6.768.863.046,65	5.344.441.898	78,96
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5.257.437.300	3.217.848.387,50	61,20
1.9	Administrasi Keuangan & Operasional KDH/WKDH	1.882.700.780,48	868.200.378	46,11
1.10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda	2.251.188.892	2.058.851.640	91,46
1.11	Penataan Organisasi	641.044.900	599.603.097	93,53

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1.12	Pelaksanaan Protokol & Komunikasi Pimpinan	640.729.000	638.752.630	99,69
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.141.183.200	9.406.953.370	92,76
2.1	Administrasi Tata Pemerintahan	1.772.962.200	1.501.954.660	84,72
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.936.085.000	7.511.904.864	94,66
2.3	Fasilitasi & Koordinasi Hukum	363.088.000	338.726.602	93,30
2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	69.048.000	54.367.244	78,74
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.517.935.600	2.144.403.732	85,16
3.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	328.536.000	316.468.307	96,33
3.2	Administrasi Pembangunan	1.599.008.804	1.320.582.342	82,60
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa	408.730.796	355.872.683	87,07
3.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	181.660.000	151.480.400	83,36
JUMLAH		57.188.679.474	48.506.464.388,50	84,69%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Capaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 57.188.679.474, realisasi anggaran mencapai Rp 48.506.464.388,50 atau 84,82% yang berada pada kategori Tinggi. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang relatif efektif.

Secara umum, capaian realisasi anggaran tersebut sejalan dengan peningkatan capaian kinerja dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis instansi, serta mendukung pencapaian target output yang menunjukkan adanya peningkatan.

Tabel 3.29
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

No	Target Realisasi 2025	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Hal yang Dilakukan/ Solusi
1	84,69 % (Tinggi)	<u>Faktor Keberhasilan</u> - Upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara memadai. - Adanya pengendalian anggaran serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap kebutuhan riil turut berkontribusi terhadap capaian realisasi anggaran.	<u>Solusi</u> Perlu dilakukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui sinkronisasi antara target input dan target output, serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala perlu terus dilakukan agar realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan dapat lebih optimal dan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertumpu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sekaligus sebagai media evaluasi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan perencanaan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, indikator pertama yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan mencapai kategori B (69,00), namun realisasinya masih berada pada kategori C (43,20) dengan capaian kinerja 62,60% yang berada pada kategori Rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas masih perlu diperkuat secara menyeluruh, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Indikator kedua, yaitu persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi, dari target 100% terealisasi sebesar 90% dengan capaian kinerja 90% yang berada pada kategori Tinggi. Meskipun belum mencapai target maksimal, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik serta mencerminkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian program oleh Sekretariat Daerah.

Indikator ketiga, yaitu persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi, dari target 80% mencapai realisasi sebesar 92,31% dengan capaian kinerja 115,39% yang berada pada kategori Sangat Tinggi/melampaui target sebesar 15,39%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan efektivitas pengelolaan program, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

Secara keseluruhan, meskipun Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih berada pada kategori C dan memerlukan perbaikan, capaian indikator lainnya menunjukkan hasil yang baik bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan menyadari bahwa peningkatan kualitas kinerja harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi strategis dalam rangka penyempurnaan perencanaan, penguatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja pada periode selanjutnya. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna mendukung terwujudnya kinerja yang semakin optimal, efektif, dan akuntabel di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 Keberhasilan pada Tahun 2025 akan menjadi tolak ukur untuk Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah di tahun 2026.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kuala Pembuang, Januari 2025



**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

Bahrin Abbas

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III IKU ESELON II	12
BAB IV IKU ESELON III	27
BAB V IKU ESELON IV	48
BAB VI PENUTUP	107
Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan IKU (Foto Copy)	
Lampiran II : Tabel Keputusan Penetapan IKU (Foto Copy)	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinir dalam pelaksanaan tugas, memberi pelayanan secara administratif dan pembinaan aparatur, serta memantau dan mengevaluasi Perangkat Daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah membuat perjanjian kinerja, sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkenan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan dan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Tujuannya disusunnya Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur.

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja Sekretaris Daerah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Bagian Pemerintahan;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1. Bagian Organisasi;
 - 2. Bagian Umum;
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - a) Kepala Sub Bagian Protokol;
 - b) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

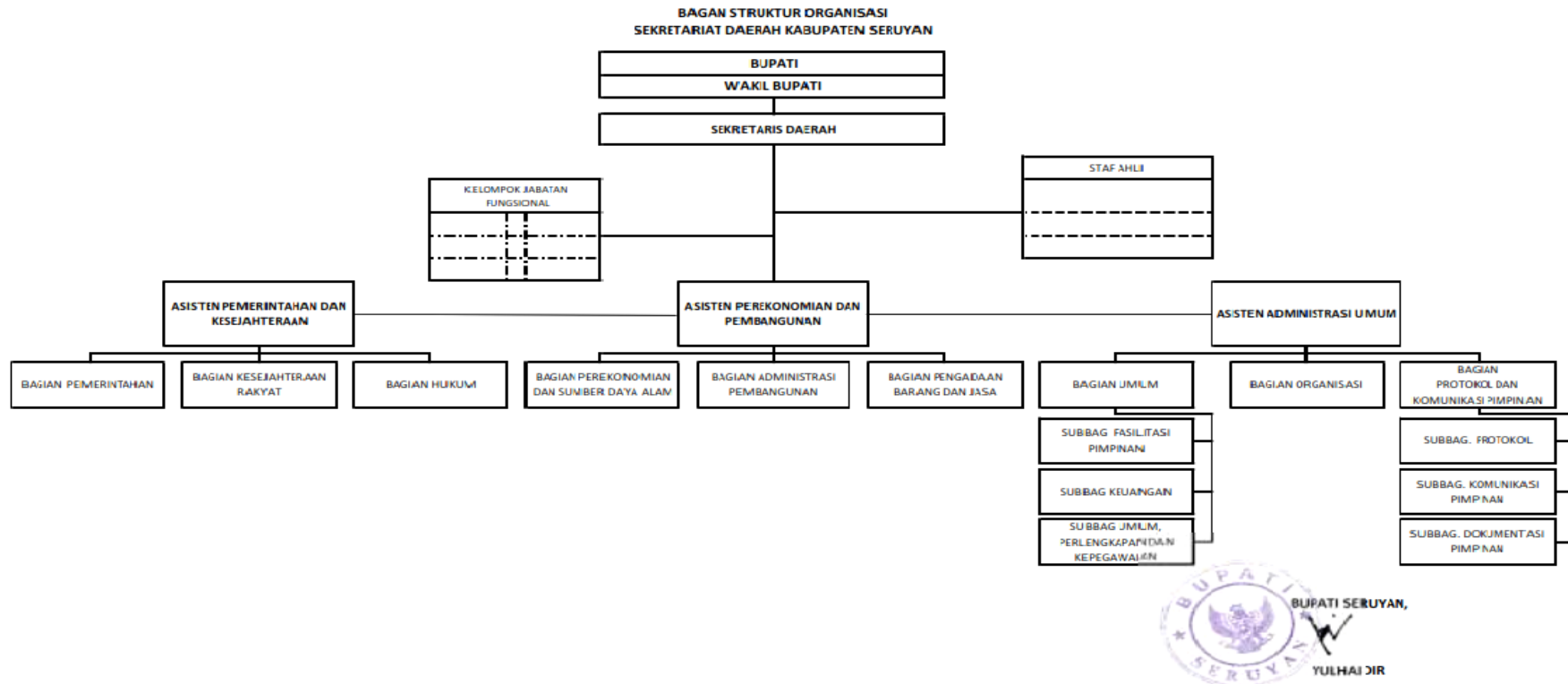
- c) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
- e. Staf Ahli;
- f. Kepegawaian dan Eselon;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Tata Kerja.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada gambar (terlampir)

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 18 TAHUN 2022
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022**

**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**



1.3 DASAR HUKUM

Landasan Dasar Hukum untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 85).
 17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.

18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perjanjian Kinerja (PK) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

BAB III IKU ESELON II

BAB IV IKU ESELON III

BAB V IKU ESELON IV

BAB VI PENUTUP

Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan IKU (Foto Copy)

Lampiran II : Tabel Keputusan Penetapan IKU (Foto Copy)

BAB II
PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

Tahun : 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penataan Organisasi		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

						Daerah
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
						Fasilitasi Bantuan Hukum
						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
					Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
3.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
						Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



BAHRUN APBAS

BAB III

IKU ESELON II

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAHRUN ABBAS**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DJAINUDDIN NOOR**

Jabatan : Pj. Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

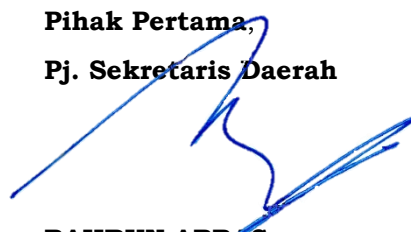
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kuala Pembuang, Januari 2025

**Pihak Kedua,
Pj. Bupati Seruyan**


DJAINUDDIN NOOR

**Pihak Pertama,
Pj. Sekretaris Daerah**


BAHRUN ABBAS

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,00)
2.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	100%
3.	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai sangat tinggi	80%

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 41.436.907.120,00	APBD
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.081.500,00	APBD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.414.000,00	APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156.912.500,00	APBD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.755.000,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.585.811.986,22	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.585.811.986,22	APBD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94.955.000,00	APBD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.955.000,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.950.000,00	APBD
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	305.950.000,00	APBD
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.610.763.750,00	APBD
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.008.400,00	APBD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.534.350,00	APBD
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.998.000,00	APBD
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.538.000,00	APBD
- Fasilitas Kunjungan Tamu	855.714.000,00	APBD
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.274.971.000,00	APBD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.186.734.500,00	APBD
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.757.826.000,00	APBD

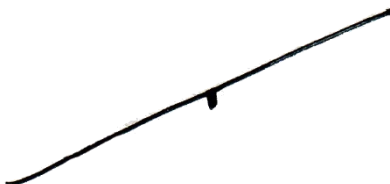
PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
- Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.718.709.000,00	APBD
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	710.199.500,00	APBD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.779.971.008,00	APBD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.400.000,00	APBD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.000.860,00	APBD
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.000.000,00	APBD
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.896.570.148,00	APBD
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.496.740.900,00	APBD
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	976.870.000,00	APBD
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	852.200.000,00	APBD
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	213.742.000,00	APBD
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.453.928.900,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.138.212.379,78	APBD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.397.368.179,78	APBD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	140.844.200,00	APBD
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	APBD
- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.789.614.496,00	APBD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	994.297.772,00	APBD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	795.316.724,00	APBD
- Kegiatan Penataan Organisasi	1.174.815.350,00	APBD
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	799.850.350,00	APBD
- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87.435.000,00	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00	APBD
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87.530.000,00	APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100.000.000,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	800.256.250,00	APBD
- Fasilitas Keprotokolan	345.006.000,00	APBD
- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	130.000.000,00	APBD
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	325.250.250,00	APBD

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11.834.814.350,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.394.249.700,00	APBD
- Penataan Administrasi Pemerintahan	1.410.977.600,00	APBD
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	181.459.000,00	APBD
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	801.813.100,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.830.508.000,00	APBD
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.993.850.000,00	APBD
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	90.653.000,00	APBD
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.746.005.000,00	APBD
- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	541.008.650,00	APBD
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	296.650.000,00	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	143.862.000,00	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100.496.650,00	APBD
- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	69.048.000,00	APBD
- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	69.048.000,00	APBD
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.451.593.192,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	377.414.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	65.841.000,00	APBD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	193.052.000,00	APBD
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	59.980.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	58.541.000,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.096.706.000,00	APBD
- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	467.438.000,00	APBD
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	813.407.000,00	APBD
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	815.861.000,00	APBD
- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	716.709.192,00	APBD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	275.640.396,00	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	201.115.796,00	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	239.953.000,00	APBD
- Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	260.764.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	134.614.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	60.988.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	65.162.000,00	APBD

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Seruyan



DJAINUDDIN NOOR

Pihak Pertama,

Pj. Sekretaris Daerah



BAHRUN ABBAS

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. SUGIAN NOOR, SE, SH, MP, CLA**

Jabatan : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAHRUN ABBAS**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

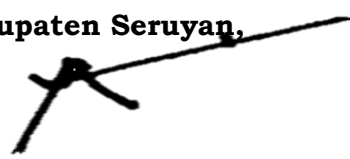
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

**Pihak Kedua,
Pj. Sekretaris Daerah,**


BAHRUN ABBAS

**Pihak Pertama,
Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan,**


H. SUGIAN NOOR, SE, SH, MP, CLA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya kinerja dan terwujudnya perumusan kebijakan strategis dan pembinaan perangkat daerah di Bidang Administrasi Umum	1. Persentase Administrasi Pelayanan Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah		100%
		2. Persentase PD yang menyelesaikan laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu		80%
		3. Persentase PD yang menyusun SOP dan Probes		80%
		4. Persentase PD yang menyusun Standart pelayanan Publik serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat		80%
		5. Persentase PD yang menjalankan dan memiliki kelompok budaya kerja		80%
		6. Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlayani dengan baik		80%
		7. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		80%
		8. Persentase persetujuan evajab Kementerian PANRB yang ditindaklanjuti menjadi Perbub Kelas jabatan		80%
		4. Persentase usulan perubahan Perbup SOTK yang ditindaklanjuti		80%

Program/ Kegiatan		Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	41.436.907.120,00	APBD
-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	443.081.500,00	APBD
-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	161.414.000,00	APBD
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	16.713.200,00	APBD

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

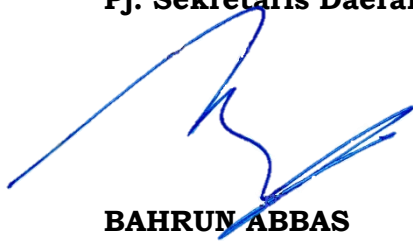
Program/ Kegiatan		Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	156.912.500,00	APBD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	124.755.000,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	18.585.811.986,22	
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	18.585.811.986,22	APBD
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	94.995.000,00	
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	94.995.000,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	335.950.000,00	
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	305.950.000,00	APBD
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	30.000.000,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	2.610.763.750,00	
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	100.008.400,00	APBD
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	226.534.350,00	APBD
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	99.998.000,00	APBD
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	53.538.000,00	APBD
- Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	855.714.000,00	APBD
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1.274.971.000,00	APBD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4.186.734.500,00	APBD
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	1.757.826.000,00	APBD
- Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	1.718.709.000,00	APBD
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	710.199.500,00	APBD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	5.759.426.662,00	APBD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	26.400.000,00	APBD
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	701.469.412,00	APBD
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	102.500.000,00	APBD
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4.929.057.250,00	APBD

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

Program/ Kegiatan		Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3.496.740.900,00	APBD
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	976.870.000,00	APBD
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	852.200.000,00	APBD
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	213.742.000,00	APBD
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	1.453.928.900,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	2.138.212.379,78	APBD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.397.368.179,78	
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	140.844.200,00	
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	600.000.000,00	APBD
- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp	1.789.614.496,00	APBD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp	994.297.772,00	APBD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp	795.316.724,00	APBD
- Kegiatan Penataan Organisasi	Rp	1.174.815.350,00	APBD
- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp	799.850.350,00	APBD
- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	87.435.000,00	APBD
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp	100.000.000,00	APBD
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	87.530.000,00	APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	100.000.000,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp	800.256.250,00	APBD
- Fasilitas Keprotokolan	Rp	345.006.000,00	APBD
- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Rp	130.000.000,00	APBD
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp	325.250.250,00	APBD

Pihak Kedua,

Pj. Sekretaris Daerah,



BAHRUN ABBAS

Pihak Pertama,

**Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan,**



SUGIAN NOOR, SPT, SE.,MP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SUHARTO, S.Sos., MM**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAHRUN ABBAS**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. Sekretaris Daerah,

BAHRUN ABBAS

Pihak Pertama,

**Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Kabupaten Seruyan,**

AGUS SUHARTO, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja dan terwujudnya perumusan kebijakan strategis dan pembinaan perangkat daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Jumlah kebijakan dan laporan tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti	9 Laporan
		2. Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	90%
		3. Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	80%
		4. Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	90%

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.834.814.350,00	APBD
- Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.394.249.700,00	APBD
- Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 1.410.977.600,00	APBD
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 181.459.000,00	APBD
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 801.813.100,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 8.830.508.000,00	APBD
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 6.993.850.000,00	APBD
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 90.653.000,00	APBD
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 1.746.005.000,00	APBD
- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 541.008.650,00	APBD
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 296.650.000,00	APBD
- Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 143.862.000,00	APBD
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 100.496.650,00	APBD
- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 69.048.000,00	APBD
- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 69.048.000,00	APBD

Pihak Kedua,

Pj. Sekretaris Daerah,



BAHRUN ABBAS

Pihak Pertama,

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Seruyan,



AGUS SUHARTO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ADHIAN NOOR, S.IP., M.A.P**

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAHRUN ABBAS**

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pj. Sekretaris Daerah,

BAHRUN ABBAS

Pihak Pertama,

**Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten Seruyan,**

ADHIAN NOOR, S.IP., M.A.P

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700311 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

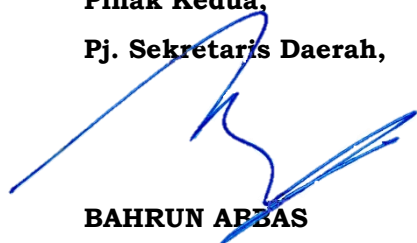
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja dan terwujudnya perumusan kebijakan strategis dan pembinaan perangkat daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase Koordinasi pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%
		2. Persentase keselarasan kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti Daerah	100%
		3. Persentase jumlah OPD yang menyampaikan Laporan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan	100%
		4. Persentase Paket yang terselesaikan	95%

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 3.451.593.192,00	APBD
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 377.414.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 65.841.000,00	APBD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 193.052.000,00	APBD
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rp. 59.980.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp. 58.541.000,00	APBD
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 2.096.706.000,00	APBD
- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 467.438.000,00	APBD
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 813.407.000,00	APBD
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 815.861.000,00	APBD
- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 716.709.192,00	APBD
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 275.640.396,00	APBD
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 201.115.796,00	APBD
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 239.953.000,00	APBD

Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
- Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 260.764.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 134.614.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 60.988.000,00	APBD
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 65.162.000,00	APBD

Pihak Kedua,

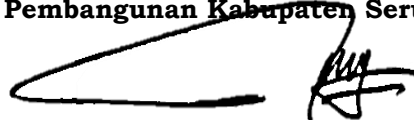
Pj. Sekretaris Daerah,



BAHRUN APBAS

Pihak Pertama,

**Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten Seruyan,**



ADHIAN NOOR, S.IP., M.A.P

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700311 199703 1 007

BAB IV
IKU ESELON III



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. MURJIAH, SE.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIAN NOOR, SE, SH, MP, CLA**

Jabatan : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Asisten Administrasi Umum Kabupaten
Seruyan,**

H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

Pihak Pertama

Kepala Bagian Umum,

Hj. Murjiah, SE.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820816 200701 2 004

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

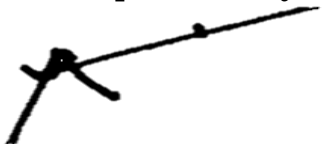
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	90%
2.	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36 Laporan
3.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
4.	Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	80%
5.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayananan penunjang urusan pemerintah daerah	80%
7.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPBMMD Perangkat Daerah	80%
8.	Terlaksananya administrasi keuangan secara tertib dan benar	Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80%
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	70 Paket

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.585.811.986,22	APBD
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 94.995.000	APBD
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 335.950.000	APBD

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.610.763.750	APBD
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.186.734.500	APBD
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 5.779.971.008	APBD
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.496.740.900	APBD
Keg. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 2.138.212.379,78	APBD
Keg. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 1.789.614.496	APBD

**Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan,**



H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

Kepala Bagian Umum,



Hj. Murjiah, SE.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820816 200701 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sukadi, S.Sos.,MM**
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA**
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

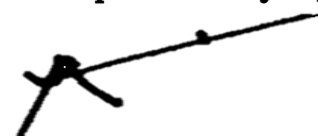
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

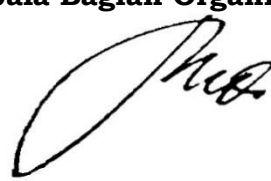
Pihak Kedua

**Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan,**


H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

Pihak Pertama

Kepala Bagian Organisasi,


Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001

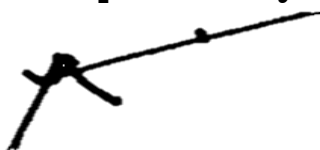
PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Baik (B) dalam penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Dokumen SAKIP	35 %
		Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja	35 PD
2.	Meningkatnya budaya kerja instansi pemerintah	Persentase PD yang telah menerapkan Core Values ASN BerAKHAL	75 %
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Reformasi Birokrasi nilainya baik (B)	45 %
		jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Zona Integritas (ZI) WBK dan WBBM	2 PD
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dimasing-masing unit pelayanan	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat	10 PD
		Persentase perangkat daerah yang menyusun SPIP	75 %
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi	0
4.	Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	persentase PD yang menyusun SOP dan Probes	75 %
5.	Meningkatnya Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah di Kabupaten Seruyan guna terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	persentase PD yang nilainya baik dalam Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	85 %
		persentase Terlaksananya Analisis Jabatan dan Analiss Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah	85 %

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

		Kabupaten Seruyan	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai Akuntabilitas Baik (B) dalam penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Dokumen SAKIP	35 %
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Penataan Organisasi		Rp. 1.174.815.350	APBD
Sub Keg. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Rp. 799.850.350	APBD
Sub Keg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Rp. 87.435.000	APBD
Sub Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Rp. 100.000.000	APBD
Sub Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Rp. 87.530.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Rp. 100.000.000	APBD

**Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan,**



H. Sugian Noor, S.Pt., SE.,SH.,MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

Kepala Bagian Organisasi,



Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMANUEL, S.H.,M.H**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SUHARTO, S.Sos., MM**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Seruyan,**

AGUS SUHARTO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bagian Hukum,

IMANUEL, S.H, M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	12 Perda
3.	Meningkatnya Kualitas Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	36 Perbup
		Jumlah Keputusan Bupati yang Dilakukan Harmonisasi Dalam Pembentukannya	540 SK
4.	Meningkatnya Pengetahuan OPD Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang Dipublikasikan Pada OPD	540 Produk Hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disosialisasikan Kepada Masyarakat	2 Produk Hukum
5.	Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan terselesaikannya permasalahan Hukum Di Kabupaten Seruyan	Jumlah Kasus yang dilakukan pendampingan bantuan hukum	2 Kasus

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 541.008.650	APBD
- Sub Keg. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Rp. 296.650.000	APBD
- Sub Keg. Bantuan hukum	Rp. 143.862.000	APBD
- Sub Keg. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Rp. 100.496.650	APBD

Pihak Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,



AGUS SUHARTO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bagian Hukum,



IMANUEL, S.H, M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sasmita, S.P**
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA**
Jabatan : Asisten Administrasi Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua
Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan



H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

Pihak Pertama
Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Sasmita, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700720 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan wakil Bupati	Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 800.256.250	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 345.006.000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 130.000.000	APBD
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 325.250.250	APBD

**Asisten Administrasi Umum
Kabupaten Seruyan**



H. Sugian Noor, SE, SH, MP, CLA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670405 199403 1 008

**Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan**



Sasmita, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820311 200604 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARINAH MAULIDAH, S.E., M.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SUHARTO, S.Sos., MM**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan,

AGUS SUHARTO, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bagian Pemerintahan,

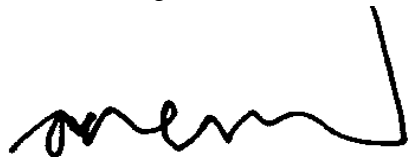
SARINAH MAULIDAH, S.E., M.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820311 200604 2 023

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Yang Efektif	Persentase terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan yang baik	100%
2.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	2 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 2.394.249.700	APBD
Sub Keg. Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 1.410.977.600	APBD
Sub Keg. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 181.459.000	APBD
Sub Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 801.813.100	APBD
Keg. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 69.048.000	APBD
Sub Keg. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 69.048.000	APBD

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan,


AGUS SUHARTO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

Kepala Bagian Pemerintahan,


SARINAH MAULIDAH, SE, ME
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820311 200604 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HALIMATUSSAADIAH, S.Pt**

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SUHARTO, S.Sos., M.M.**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, **Januari 2025**

Pihak Kedua
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Seruyan,

Agus Suharto, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Seruyan,

Halimatussaadiyah, S.Pt
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760312 201101 2 007

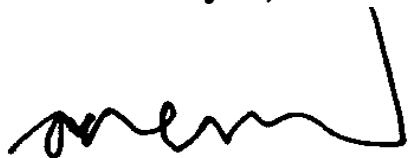
PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	15 dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 8.830.508.000	APBD
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 6.993.850.000	APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Rp. 90.653.000	APBD
Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Rp. 1.746.005.000	APBD

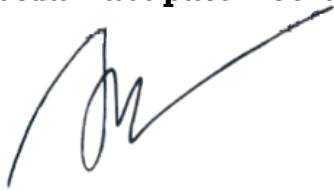
Pihak Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seruyan,


Agus Suharto, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Seruyan,


Halimatussaadiyah, S.Pt
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760312 201101 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ashadi, S.T**

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Adhian Noor, S.IP., M.A.P**

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten Seruyan,

Adhian Noor, S.IP., M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700311 199703 1 007

Pihak Pertama
Kepala Bagian Perekonomian
dan SDA,

Ashadi, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19800126 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

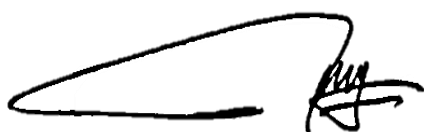
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Persentase Strategis dibidang Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Perekonomian yang di tindaklanjuti	Rekomendasi Kebijakan-Kebijakan Pengendalian Perekonomian yang di tindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya dan terselenggaranya koordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi perangkat daerah/unit kerja lingkup perekonomian sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan	Persentase penyelesaian koordinasi pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi PD/Unit kerja lingkup bidang perekonomian	100%
3.	Meningkatnya pencapaian sasaran kebijakan strategis pemerintah kab. Seruyan dalam lingkup bidang perekonimian sesuai dengan terget	Persentase pencapaian sasaran strategis Pemkab. Seruyan dalam lingkup bidang perekonimian sesuai dengan terget yang telah ditetapkan	85%
4.	Meningkatnya kebijakan Strategis dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah	3 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp. 377.414.000	APBD
Sub.Keg.Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 65.841.000	APBD
Sub Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 193.052.000	APBD
Sub Keg. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 59.980.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp. 58.541.000	APBD

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

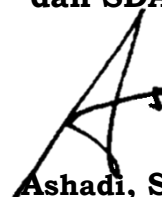
Keg. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 260.764.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 134.614.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 60.988.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 65.162.000	APBD

**Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Seruyan,**



Adhian Noor, S.IP., M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700311 199703 1 007

**Kepala Bagian Perekonomian
dan SDA,**



Ashadi, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19800126 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M**
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ADHIAN NOOR, S.IP., M.A.P**
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten Seruyan,**

ADHIAN NOOR, S.IP., M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700311 199703 1 007

Pihak Pertama

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,**

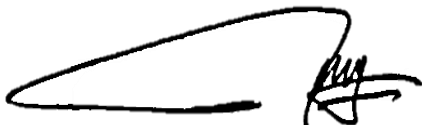
ROBY LESMANA GELIAN, SE, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770701 200501 1 012

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

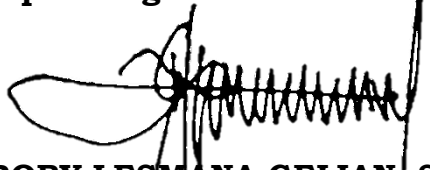
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi yang baik dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%
2.	Meningkatnya pelaksanaan dan Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Seruyan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2.096.706.000	APBD
Sub Keg. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	467.438.000	APBD
Sub Keg. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	813.407.000	APBD
Sub Keg. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	815.861.000	APBD
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	443.081.500	APBD
Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.414.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156.912.500	APBD
Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.755.000	APBD

**Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Seruyan,**


ADHIAN NOOR, S.IP., M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700311 199703 1 007

Kepala Bagian Adm. Pembangunan,


ROBY LESMANA GELIAN, SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770701 200501 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Adhian Noor, S.IP., M.A.P**

Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Kabupaten Seruyan,**

Adhian Noor, S.IP., M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700311 199703 1 007

Pihak Pertama

**Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa,**

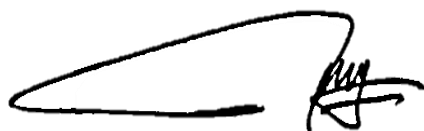
Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya dan terlaksananya fasilitasi dan koordinasi proses pengadaan barang/ jasa	Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	90 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 716.709.192	APBD
Sub Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 275.640.396	APBD
Sub Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 201.115.796	APBD
Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 239.953.000	APBD

**Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kabupaten Seruyan,**



Adhian Noor, S.IP., M.A.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700311 199703 1 007

**Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa,**



Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

BAB V

IKU ESELON IV



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURHALIMAH, S.AP**

Jabatan : Kasubbag Fasilitasi Pimpinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MURJIAH, SE.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Umum,

Hj. Murjiah, SE.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19820816 200701 2 004

Pihak Pertama

Kasubbag Fasilitasi Pimpinan,

Nurhalimah, S.AP

Penata (III/c)

NIP. 19860403 201503 2 006

No	Kegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Tersedianya Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan - Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang 2 Orang 2 Orang
2.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan - Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	- Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan - Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket 12 Paket

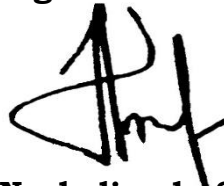
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Sub. Keg. Penyediaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Sub. Keg. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.397.368.179,78 Rp. 140.844.200,00 Rp. 600.000.000	APBD APBD APBD
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah - Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Sub. Keg. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 994.297.772,00 Rp. 795.316.724,00	APBD APBD

**Kepala Bagian Umum
Kabupaten Seruyan,**



Hj. Murjiah, SE.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820816 200701 2 004

Kasubbag Fasilitasi Pimpinan,



Nurhalimah, S.AP
Penata (III/c)
NIP. 19860403 201503 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUPARDI, A.Md**

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MURJIAH, SE.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Umum,

Hj. Murjiah, SE.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19820816 200701 2 004

Pihak Pertama

Kasubbag Keuangan,

Supardi, A.Md

Penata (III/c)

NIP. 19831109 200903 1 003

	Kegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Terbayarnya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan

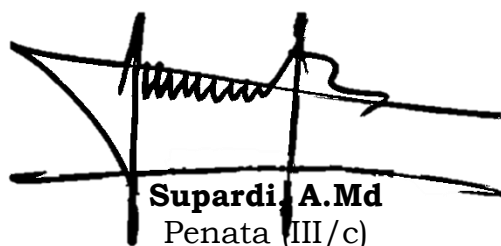
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 18.585.811.986,22	APBD

**Kepala Bagian Umum
Kabupaten Seruyan,**



Hj. Murjiah, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820816 200701 2 004

Kasubbag Keuangan,



Supardi, A. Md
Penata (III/c)
NIP. 19831109 200903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Munir, S.Kom.,MM**

Jabatan : Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. Murjiah, SE.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Umum,

Hj. Murjiah, SE.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19820816 200701 2 004

Pihak Pertama

Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian,

Ahmad Munir, S.Kom.,MM

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19810427 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Kegiatan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Terlaksananya Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Paket 15 Orang
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Bahan Logistik Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Paket 12 paket 12 Paket 25 Paket 12 Laporan 100 Laporan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

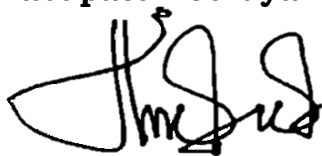
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
- Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	
- Tersedianya kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	
- Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	
- Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	- Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
- Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 94.995.000	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
- Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 305.950.000	APBD
- Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 30.000.000	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
- Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 100.008.400	APBD
- Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 226.534.350	
- Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 99.998.000	
- Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 53.538.000	
- Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 855.714.000	
- Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.274.971.000	

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

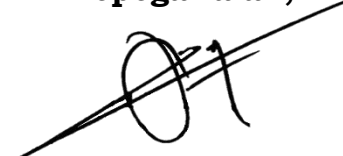
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.757.826.000 Rp. 1.718.709.000 Rp. 710.199.500	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 26.400.000 Rp. 720.000.860 Rp. 137.000.000 Rp. 4.896.570.148	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp. 976.870.000 Rp. 852.200.000 Rp. 213.742.000 Rp. 1.453.928.900	APBD

**Kepala Bagian Umum
Kabupaten Seruyan,**



Hj. Murjiah, SE., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820816 200701 2 004

**Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian,**



Ahmad Munir, S.Kom., MM
Penata Tk.I(III/d)
NIP. 19810427 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MILLA ASTRI SAKDIYA, S.H.**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMANUEL, S.H.,M.H**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Hukum,

IMANUEL, S.H, M.H

Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

Pihak Pertama

Perancang Peraturan Perundang-undangan,

MILLA ASTRI SAKDIYA, S.H.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850718 201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	540 Dokumen

Pihak Kedua

Kepala Bagian Hukum



IMANUEL, S.H., M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

Pihak Pertama

Perancang Peraturan Perundang-undangan,



MILLA ASTRI SAKDIYA, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850718 201001 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI ASTUTI, S.H.**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMANUEL, S.H.,M.H**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, **Januari 2025**

Pihak Kedua

Kepala Bagian Hukum,

IMANUEL, S.H, M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

Pihak Pertama

Perancang Peraturan Perundang-undangan,

TRI ASTUTI, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850708 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus

Pihak Kedua

Kepala Bagian Hukum



IMANUEL, S.H, M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

Pihak Pertama

Perancang Peraturan Perundang-undangan,



TRI ASTUTI, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19850708 201001 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRI FEBRIANTO, S.Psi**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMANUEL, S.H.M.H**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Hukum,

IMANUEL, S.H. M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

Pihak Pertama

Perancang Peraturan Perundang-undangan,

ANDRI FEBRIANTO, S.Psi
Penata (III/c)
NIP. 19920224 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	540 Dokumen

Pihak Kedua

Kepala Bagian Hukum



IMANUEL, S.H., M.H
Jaksa Utama Pratama (IV/b)
NIP. 19710520 199803 1 008

Pihak Pertama

Perancang Peraturan Perundang-undangan,



ANDRI FEBRIANTO, S.Psi
Penata (III/c)
NIP. 19920224 201503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abul Hasan Asy'ari, S.AP., M.A.P**

Jabatan : Analis SDM Aparatur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sukadi, S.Sos.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Organisasi

Sukadi, S.Sos.,MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19650506 198709 1001

Pihak Pertama

Analis SDM Aparatur

Abul Hasan Asy'ari, S.AP.,M.A.P

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19820720 200604 1 009

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen

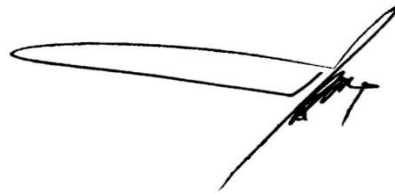
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 799.850.350	APBD

Kepala Bagian Organisasi



Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001

Analisis SDM Aparatur



Abul Hasan Asy'ari, S.AP.,M.A.P
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820720 200604 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lienda Yuliana, S.H.,M.M**

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sukadi, S.Sos.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Organisasi

Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001

Pihak Pertama

Analis Kebijakan

Lienda Yuliana, S.H., M.M.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850705 201001 2 007

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana.	3 laporan
2.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata Laksana	10 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Rp. 87.435.000	APBD
Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 87.530.000	APBD

Kepala Bagian Organisasi,



Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001

Analisis Kebijakan



Lienda Yuliana, S.H., M.M.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850705 201001 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Johan Wahyudi, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sukadi, S.Sos.,MM**

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Organisasi

Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001,

Pihak Pertama

Analis Kebijakan

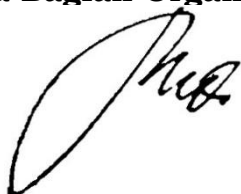
Johan Wahyudi, S.E., M.A P
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760808 200701 1 022

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	1. Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	5 Dokumen
	2. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2. Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen

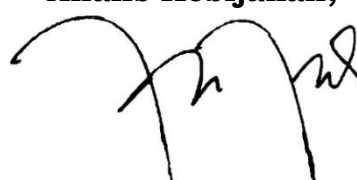
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Keg. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 100.000.000	APBD
Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 100.000.000	APBD

Kepala Bagian Organisasi,



Sukadi, S.Sos.,MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19650506 198709 1001

Analisis Kebijakan,



Johan Wahyudi, S.E., M.A P
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19760808 200701 1 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zain Abdurrasyid Fitri Hanafi, S. STP**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sasmita, SP**

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian Protokol

Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sasmita, SP

Zain Abdurrasyid Fitri Hanafi, S. STP

Pembina Tk. I (IV/b)

Penata (III /c)

NIP. 19700720 199403 1 006

NIP. 19950204 201808 1 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	32 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 345.006.000	APBD

**Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan**



Sasmita, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700720 199403 1 006

**Kepala Sub Bagian
Protokol**



Zain Abdurrasyid Fitri Hanafi, S. STP
Penata (III/c)
NIP. 19950204 201808 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Arianto, S.Hi., M.M**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sasmita, SP**
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sasmita, SP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700720 199403 1 006

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian

Komunikasi Pimpinan

Budi Arianto, S. Hi., M.M

Penata Tk. I (III /d)

NIP. 19840401 201101 1 009

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	20 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 130.000.000	APBD

**Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan**



Sasmita, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700720 199403 1 006

**Kepala Sub
Komunikasi Pimpinan**



Budi Arianto, S. Hi, M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19840401 201101 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fery Rahmad, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sasmita, SP**

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sasmita, SP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700720 199403 1 006

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian

Dokumentasi Pimpinan

Fery Rahmad, S. Sos

Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP. 19910710 201503 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dokumentasi pimpinan	Jumlah laporan hasil dokumentasi pimpinan	25 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 325.250.250	APBD

**Kepala Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan**



Sasmita, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700720 199403 1 006

**Kepala Sub Bagian
Dokumentasi Pimpinan**



Fery Rahmad, S. Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19910710 201503 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN FITHRI INDARAHMANI, S.IP, M.A.P**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SARINAH MAULIDAH, SE, ME**

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Pemerintahan,

SARINAH MAULIDAH SE, ME
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820311 200604 2 023

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Ahli Muda,

DIAN FITHRI INDARAHMANI, S.IP, M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19890310 201503 2 006

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen

Kepala Bagian Pemerintahan,



SARINAH MAULIDAH, SE, ME
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820311 200604 2 023

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



DIAN FITHRI INDARAHMANI, S.IP, M.A.P
Penata (III/c)
NIP. 19890310 201503 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGIARTO, S.Sos.,M.A.P.**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HALIMATUSSAADIYAH, S.Pt**

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Seruyan,**

Halimatussaadiyah, S.Pt

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19760312 201101 2 007

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Ahli Muda,

Sugiarto, S.Sos.,M.A.P.

Penata (III/c)

NIP. 19841007 200501 1 003

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen
2.	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp. 6.993.850.000	APBD
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 1.746.005.000	APBD

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Seruyan,**

Halimatussaadiyah, S.Pt
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760312 201101 2 007

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

Sugiarto, S.Sos., M.A.P.
Penata (III/c)
NIP. 19841007 200501 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASPIANUR, S.KM.**

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HALIMATUSSAADIYAH, S.Pt**

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Seruyan,**

Halimatussaadiyah, S.Pt
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760312 201101 2 007

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Ahli Muda,

Kaspianur, SKM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760819 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 90.653.000	APBD

Pihak Kedua

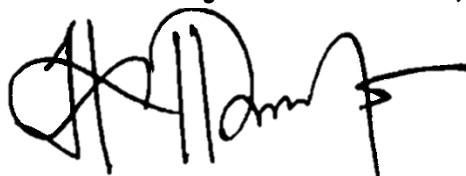
**Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Seruyan,**



Halimatussaadiyah, S.Pt
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19760312 201101 2 007

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Kaspianur, SKM
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19760819 199502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nova Mycellina, S.E.**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ashadi, ST**
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Perekonomian dan
SDA,**

Ashadi, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19800126 201001 1 005

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Ahli Muda,

Nova Mycellina, S.E.
Penata (III/c)
NIP. 19890521 201503 2 007

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan
2.	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Keg. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 193.052.000	APBD
Sub Keg. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 59.980.000	APBD

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,



Ashadi, ST
Pembina(IV/a)
NIP. 19800126 201001 1 005

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Nova Mycellina, S.E.
Penata (III/c)
NIP. 19890521 201503 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliana,SE**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ashadi, ST**
Jabatan : **Kepala Bagian Administrasi Pembangunan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,

Ashadi, ST
Pembina (IV/a)

NIP. 19800126 201001 1 005

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Ahli Muda,

Yuliana,SE
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19870727 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen

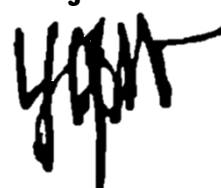
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub.Keg.Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 65.841.000	APBD
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Rp. 58.541.000	APBD

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA,



Ashadi, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19800126 201001 1 005

Analisis Kebijakan Ahli Muda,



Yuliana, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870727 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAHDA EMILIA, S.STP**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,**

ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770701 200501 1 012

Pihak Pertama

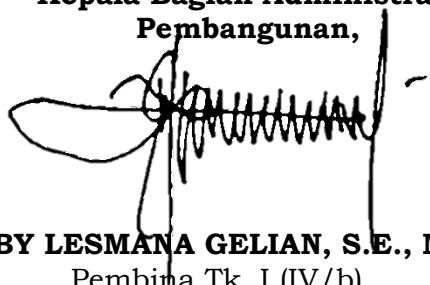
Perencana Ahli Muda,

MAHDA EMILIA, S.STP
Penata (III/c)
NIP. 19910717 201206 2 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen
2	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
3	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
7	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen
8	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,**



ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770701 200501 1 012

Perencana Ahli Muda,



MAHDA EMILIA, S.STP
Penata (III/c)
NIP. 19910717 201206 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT, S.T., M.M**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,**

ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770701 200501 1 012

Pihak Pertama

Perencana Ahli Muda,

RAHMAT, S.T., M.M

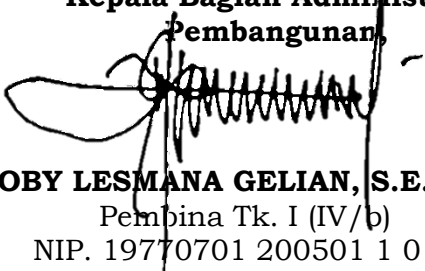
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19780607 201001 1 008

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan**


ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770701 200501 1 012

Perencana Ahli Muda,

RAHMAT, S.T., M.M
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19780607 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DENI GUNAWAN, A.Md**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M**

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,**

ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770701 200501 1 012

Pihak Pertama

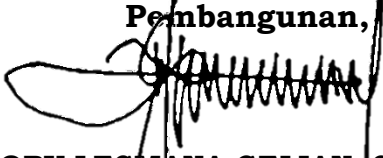
Perencana Ahli Muda,

DENI GUNAWAN, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 19801228 200501 1 012

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan

**Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,**


ROBY LESMANA GELIAN, S.E., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19770701 200501 1 012

Perencana Ahli Muda,

DENI GUNAWAN, A.Md
Penata (III/c)
NIP. 19801228 200501 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Chrosty Maripul Stevano Marbun, S.Kom**

Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, SE**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Pengelola PBJ Ahli Muda

Taufik Hidayat, S.E

Chrosty Maripul Stevano Marbun, S.Kom

Pembina (IV/a)

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19781011 201001 1 001

NIP. 19830820 200903 1 002

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 orang

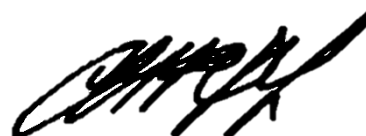
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 275.640.396	APBD
Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 239.953.000	APBD

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

Pengelola PBJ Ahli Muda,



Chrosty Maripul Stevano Marbun, S.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19830820 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bahriannur, S.H., M.M.**
Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Pengelola PBJ Ahli Muda

Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

Bahriannur, S.H., M.M.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19860525 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terkelolanya Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Sub Keg. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 201.115.796	APBD

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,



Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

Pengelola PBJ Ahli Muda,



Bahriannur, S.H., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19860525 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ruslian Nor, S.E., M.M.**
Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda

Ruslian Nor, S.E., M.M.

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19810325 200802 1 001

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dukungan tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah dokumen terkait tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	20 dokumen

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**



Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda



Ruslian Nor, S.E., M.M.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19810325 200802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Samsul Melki Sapan, S.E.,M.M**

Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola/PBJ Ahli Muda

Samsul Melki Sapan, S.E.,M.M
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19780504 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dukungan tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah dokumen terkait tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	20 dokumen

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

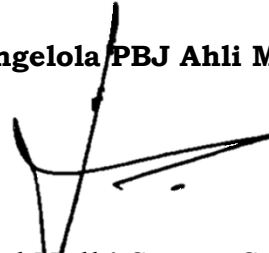


Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda



Samsul Melki Sapan, S.E.,M.M

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19780504 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Fitriati, S.Sos.,M.A.P**

Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda

Siti Fitriati, S.Sos.,M.A.P

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19800812 200604 2 028

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dukungan tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah dokumen terkait tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	20 dokumen

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**



Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda



Siti Fitriati, S.Sos., M.A.P
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19800812 200604 2 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andreas Yudianto, S.I.P.,M.M**

Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda

Andreas Yudianto, S.I.P.,M.M

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19860103 200903 1 002

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dukungan tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah dokumen terkait tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	20 dokumen

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**



Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda



Andreas Yudianto, S.I.P., M.M

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19860103 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yessy Veronicha Toledo,S.T**

Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda

Yessy Veronicha Toledo,S.T

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19830715 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dukungan tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah dokumen terkait tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	20 dokumen

Pihak Kedua

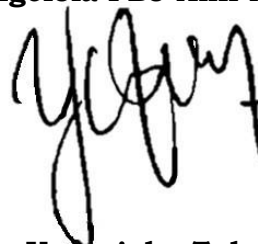
**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**



Taufik Hidayat, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda



Yessy Veronicha Toledo, S.T
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19830715 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Ridho Ahimsha, S.Si**

Jabatan : Pengelola PBJ Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Taufik Hidayat, S.E**

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Seruyan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2025

Pihak Kedua

**Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa,**

Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda

M. Ridho Ahimsha, S.Si

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19840509 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA (PK)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya dukungan tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah dokumen terkait tata kelola pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	20 dokumen

Pihak Kedua

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa,



Taufik Hidayat, S.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19781011 201001 1 001

Pihak Pertama

Pengelola PBJ Ahli Muda



M. Ridho Ahimsha, S.Si

Penata Tk.I (III/d)

NIP.19840509 201001 1 002

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas serta menilai keberhasilan organisasi.

Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang bersumber dari dana APBD dengan total anggaran Rp. 52.843.314.662, terdiri dari Rp. 50.094.687.062 Belanja Operasi dan Rp. 2.748.627.600 Belanja Modal, dengan meliputi 3 Program, 20 Kegiatan, dan 66 Sub Kegiatan. Kegiatan yang sudah termasuk program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung/penunjang indikator kinerja utama Kabupaten dan Perangkat Daerah.

Demikian dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini disusun, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang akan dicapai.

Kuala Pembuang, Januari 2025


SEKRETARIS DAERAH,
Bahrin Abbas

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		K		Rp	K		Rp	(%)	
			SEKRETARIAT DAERAH									
		4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CUKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun								
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	71,402,000.00	4	Dokumen	136,794,288.00	100	
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15,206,500.00	0	Dokumen	-	0	
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	8,059,000.00	0	Dokumen	-	0	
		4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5,505,500.00	0	Dokumen	-	0	
		4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,505,500.00	0	Dokumen	-	0	
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	40,092,000.00	4	Dokumen	17,030,000.00	100	
		4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	5,052,000.00	2	Laporan	2,700,000.00	50	
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan								
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	Orang/ Bln	20,358,365,417.00	430	Orang/ Bln	15,852,524,162.00	358.3333333	
		4.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
		4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	Laporan	95,000,000.00	36	Laporan	22,987,827.00	100	
		4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah								
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	150,000,000.00	2	Paket	-	100	
		4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	30,000,000.00	15	Orang	-	100	
		4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah								
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	150,000,000.00	36	Paket	205,082,400.00	100	
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	150,000,000.00	12	Paket	344,384,950.00	100	
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	100,000,000.00	13	Paket	332,348,000.00	108.3333333	
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	50,000,000.00	25	Paket	83,485,000.00	100	
		4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	850,000,000.00	13	Laporan	1,437,281,000.00	108.3333333	
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	1,000,000,000.00	100	Laporan	2,214,065,294.00	100	
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

SETDA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit	1,200,000,000.00	3.00	unit	1,526,800,000.00	150	
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional yang disediakan	2	unit	850,000,000.00	0	unit	-	0	
		4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	unit	200,000,000.00	3	unit	1,873,107,000.00	300	
		4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayananan penunjang urusan pemerintah daerah								
		4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	26,400,000.00	15	Laporan	18,000,000.00	125	
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1,100,000,000.00	12	Laporan	683,560,767.00	100	
		4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	50,000,000.00	15	Laporan	140,346,000.00	125	
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5,442,015,000.00	12	Laporan	4,502,535,131.00	100	
		4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPBMD Perangkat Daerah								
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	Unit	938,000,000.00	40	Unit	781,837,407.50	133.3333333	
		4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43	Unit	800,000,000.00	44	Unit	650,017,900.00	102.3255814	
		4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang Dipelihara	100	Unit	90,000,000.00	102	Unit	202,398,100.00	102	
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	
		4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	-	0	Unit	-	#DIV/0!	
		4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	159,730,821.00	12	Unit	1,504,894,980.00	100	
		4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	266,106,954.00	7	Orang	324,787,378.00	350	
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	Paket	50,000,000.00	6	Paket	317,902,335.00	300	
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang	200,000,000.00	6	Orang	404,330,000.00	300	
		4.01.01.2.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan								
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	200,000,000.00	12	Paket	1,502,882,561.00	100	
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket	50,000,000.00	12	Paket	555,969,079.00	100	
		4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi								
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6	Dokumen	200,000,000.00	4	Dokumen	410,477,450.00	66.66666667	
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	Laporan	87,500,000.00	7	Laporan	47,584,465.00	140	
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	Dokumen	100,000,000.00	5	Dokumen	41,328,122.00	100	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15	Dokumen	87,500,000.00	18	Dokumen	44,051,100.00	120	
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Dokumen	100,000,000.00	3	Dokumen	56,161,960.00	100	
		4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan								
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	32	Laporan	307,050,000.00	83	Laporan	149,672,953.00	259.375	
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	20	Laporan	93,000,000.00	54	Laporan	109,420,688.00	270	
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25	Laporan	300,200,000.00	71	Laporan	379,658,989.00	284	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
		4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya Admnistrasi Tata Pemerintahan yang baik								
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2	Dokumen	181,672,000.00	36	Dokumen	740,550,247.00	1800	
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Dokumen	473,895,000.00	15	Dokumen	148,325,969.00	500	
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	169,839,900.00	36	Dokumen	613,078,444.00	900	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan								
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7	Dokumen	2,243,850,000.00	8	Dokumen	6,128,747,047.00	114.2857143	
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5	Dokumen	396,000,000.00	5	Dokumen	50,247,740.00	100	
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	Dokumen	90,000,000.00	3	Dokumen	1,332,910,077.00	100	
		4.01.02.2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi								
		4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	540	Dokumen	96,406,000.00	540	Dokumen	319,330,502.00	100	
		4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	Kasus	143,862,000.00	0	Kasus	4,275,700.00	0	
		4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	540	Dokumen	100,500,000.00	540	Dokumen	15,120,400.00	100	
		4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah								
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitas kerjasama dalam negeri	2	Dokumen	80,000,000.00	11	Dokumen	54,367,244.00	550	
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan								
		4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian								
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Dokumen	90,000,000.00	1	Dokumen	67,200,100.00	100	
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Laporan	83,047,200.00	1	Laporan	134,876,707.00	100	
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	60,000,000.00	1	Dokumen	58,842,900.00	100	
		4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dokumen	45,000,000.00	1	Dokumen	55,548,600.00	100	
		4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk Keselarasan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
		4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen	138,006,000.00	2	Dokumen	587,513,100.00	100	
		4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	422,104,800.00	4	Laporan	340,111,536.00	100	
		4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	2,287,784,000.00	2	Laporan	392,957,706.00	100	
		4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan								
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen	171,298,192.00	3	Dokumen	152,898,900.00	300	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen	305,241,216.00	4	Dokumen	82,813,564.00	400	
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10	Orang	240,180,000.00	8	Orang	120,160,219.00	80	
		4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah								
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1	Dokumen	80,000,000.00	1	Dokumen	57,173,700.00	100	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1	Dokumen	50,000,000.00	1	Dokumen	42,654,900.00	100	
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	Dokumen	60,000,000.00	1	Dokumen	51,651,800.00	100	
					1,900		43,990,377.000.00	2,462		48,427,764,388.50		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					129.58					110.09		
					Predikat Kinerja							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Renstra dan Renja harus konsisten dengan RKA dan DPA												

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			K		Rp	K		Rp	%	
		SEKRETARIAT DAERAH										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran %, Persentase PD yang Menyelesaikan Laporan Kinerja yang Akuntabel dan Tepat Waktu, Persentase PD yang Menyusun SOP dan Probes, Persentase PD yang Menyusun Standart Pelayanan Publik serta Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, Persentase PD yang Menjalankan dan Memiliki Kelompok Budaya Kerja, Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlayani Dengan Baik, Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai, Persentase Persetujuan Evajab Kementerian PANRB yang Ditindaklanjuti Menjadi Perbup Kelas Jabatan, Persentase Usulan Perubahan Perbup SOTK yang Ditindaklanjuti									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	138,232,000.00								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,550,500.00	4	Dokumen	31,550,500.00	8	Dokumen	28,656,900.00	200	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,507,000.00	1	Dokumen	1,507,000.00	1	Dokumen	-	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,507,000.00	1	Dokumen	1,507,000.00	1	Dokumen	-	100	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,120,000.00	1	Dokumen	4,120,000.00	0	Dokumen	-	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,507,000.00	1	Dokumen	1,507,000.00	0	Dokumen	-	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96,533,500.00	4	Dokumen	96,533,500.00	4	Dokumen	91,626,500.00	100	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,507,000.00	4	Laporan	1,507,000.00	0	Laporan	-	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Keuangan									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15,111,779,995.00	130	Orang/ Bln	15,111,779,995.00	206	Orang/ Bln	13,092,205,042.00	158.4615385	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	145,468,000.00	36	Laporan	145,468,000.00	36	Laporan	95,692,808.00	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	501,300,000.00								
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	291,300,000.00	2	Paket	291,300,000.00	2	Paket	287,535,000.00	100	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	210,000,000.00	15	Orang	210,000,000.00	12	Orang	128,275,000.00	80	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,550,492,300.00								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	249,669,600.00	36	Paket	249,669,600.00	36	Paket	136,385,300.00	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,774,828,650.00	12	Paket	2,774,828,650.00	12	Paket	2,183,730,280.00	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	428,397,300.00	12	Paket	428,397,300.00	12	Paket	406,458,450.00	100	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36,918,000.00	25	Paket	36,918,000.00	25	Paket	36,911,000.00	100	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	2,553,231,750.00	12	Laporan	2,553,231,750.00	12	Laporan	2,196,273,500.00	100	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,507,447,000.00	100	Laporan	3,507,447,000.00	301	Laporan	3,227,684,443.00	301	

SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	740,015,200.00								
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	377,000,000.00			377,000,000.00			362,600,000.00	#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	363,015,200.00	1	unit	363,015,200.00	1	unit	512,250,113.00	100	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayananan penunjang urusan pemerintah daerah	5,970,232,551.00								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54,700,000.00	12	Laporan	54,700,000.00	12	Laporan	-	100	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	734,335,801.00	12	Laporan	734,335,801.00	12	Laporan	555,874,384.00	100	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	281,750,000.00	12	Laporan	281,750,000.00	12	Laporan	252,468,500.00	100	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,899,446,750.00	12	Laporan	4,899,446,750.00	12	Laporan	4,365,945,540.00	100	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai dengan RKPBMĐ Perangkat Daerah	4,072,194,550.00								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	911,200,000.00	43	Unit	911,200,000.00	25	Unit	518,906,779.58	58.13953488	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	303,880,000.00	100	Unit	303,880,000.00	10	Unit	244,988,150.00	10	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	962,448,000.00	0	Unit		10	Unit	-	#DIV/0!	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,894,666,550.00	0	Unit	1,894,666,550.00	0	Unit	-	#DIV/0!	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30	Unit	962,448,000.00		Unit	1,118,684,650.00	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12	Unit			Unit	848,500,000.00	0	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0	Orang		0	Orang	-	#DIV/0!	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0	Paket		0	Paket	-	#DIV/0!	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400,000,000.00	2	Orang	400,000,000.00	4	Orang	127,000,000.00	200	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan	960,887,402.00								
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	893,393,651.00	12	Paket	893,393,651.00	12	Paket	899,865,866.00	100	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	67,493,751.00	12	Paket	67,493,751.00	12	Paket	48,707,172.00	100	
		Penataan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penyusunan Laporan Kinerja dan Penyusunan Dokumen SAKIP, Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja, Persentase PD yang Telah Menerapkan Core Values ASN BerAKHLAK, Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun SPP, Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Mengikuti Kompetisi, Persentase PD yang Menyusun SOP dan Probes, Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	892,214,550.00								
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	404,115,550.00	3	Dokumen	404,115,550.00	3	Dokumen	350,086,971.00	100	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	111,789,000.00	6	Laporan	111,789,000.00	6	Laporan	110,502,097.00	100	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	99,993,500.00	5	Dokumen	99,993,500.00	5	Dokumen	96,991,583.00	100	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	96,445,000.00	20	Dokumen	96,445,000.00	20	Dokumen	94,994,221.00	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	179,871,500.00	3	Dokumen	179,871,500.00	3	Dokumen	176,278,351.00	100	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	1,255,353,000.00								
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	306,970,000.00	40	Laporan	306,970,000.00	43	Laporan	306,758,044.00	107.5	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	369,181,000.00	30	Laporan	369,181,000.00	29	Laporan	368,631,408.00	96.66666667	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	579,202,000.00	35	Laporan	579,202,000.00	19	Laporan	629,091,844.00	54.28571429	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang Terfasilitasi, Jumlah Kebijakan dan Laporan Tata kelola Pemerintahan yang Ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti									
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya Admnistrasi Tata Pemerintahan yang baik	3,245,114,700.00								
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1,282,632,900.00	2	Dokumen	1,282,632,900.00	28	Dokumen	981,350,435.00	1400	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	272,949,400.00	3	Dokumen	272,949,400.00	10	Dokumen	250,612,627.00	333.3333333	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1,689,532,400.00	4	Dokumen	1,689,532,400.00	41	Dokumen	1,427,904,379.00	1025	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan	10,019,275,000.00								
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7,778,258,000.00	7	Dokumen	7,778,258,000.00	12	Dokumen	6,081,661,913.00	171.4285714	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	99,921,000.00	5	Dokumen	99,921,000.00	7	Dokumen	99,392,622.00	140	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2,141,096,000.00	3	Dokumen	2,141,096,000.00	6	Dokumen	1,388,757,970.00	200	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang terfasilitasi	840,544,900.00								
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	448,255,000.00	540	Dokumen	448,255,000.00	540	Dokumen	398,873,768.00	100	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	143,805,000.00	2	Kasus	143,805,000.00	1	Kasus	121,249,832.00	50	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	248,484,900.00	540	Dokumen	248,484,900.00	540	Dokumen	169,943,800.00	100	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah									
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	154,197,000.00	2	Dokumen	154,197,000.00	14	Dokumen	133,360,366.00	700	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perekonomian, Persentase Keselarasan Kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti Daerah, Persentase Jumlah OPD yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan, Persentase Paket yang Terselasaikan									
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan-Kebijakan Pengendalian Perekonomian yang Ditindaklanjuti, Persentase Penyelesaian Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pemantauan dan Evaluasi PD/ Unit Kerja Lingkup Bidang Perekonomian, Persentase Pencapaian Sasaran Strategis Pemkab Seruyan Dalam Lingkup Bidang Perekonomian Sesuai Dengan Target yang Telah Ditetapkan	698,783,000.00								
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	103,962,000.00	1	Dokumen	103,962,000.00	1	Dokumen	90,332,867.00	100	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	450,146,000.00	1	Laporan	450,146,000.00	2	Laporan	439,384,966.00	200	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	99,689,000.00	1	Dokumen	99,689,000.00	2	Dokumen	87,693,235.00	200	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	44,986,000.00	1	Dokumen	44,986,000.00	1	Dokumen	38,880,948.00	100	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk Keselarasan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2,340,993,500.00								
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1,152,575,500.00	2	Dokumen	1,152,575,500.00	2	Dokumen	981,810,023.00	100	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	526,045,000.00	4	Laporan	526,045,000.00	4	Laporan	441,006,173.00	100	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	662,373,000.00	2	Laporan	662,373,000.00	2	Laporan	470,378,148.00	100	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	1,220,135,192.00								
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	256,441,000.00	1	Dokumen	256,441,000.00	2	Dokumen	225,944,150.00	200	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	305,199,192.00	1	Dokumen	305,199,192.00	5	Dokumen	232,471,700.00	500	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	658,495,000.00	10	Orang	658,495,000.00	8	Orang	648,279,494.00	80	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah kebijakan dibidang Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti daerah	637,424,000.00								
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	312,546,000.00	1	Dokumen	312,546,000.00	1	Dokumen	270,984,752.00	100	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	149,940,000.00	1	Dokumen	149,940,000.00	1	Dokumen	143,807,219.00	100	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Ketersediaan Data Bidang ESDM dan Rasio Elektrifikasi	174,938,000.00	1	Dokumen	174,938,000.00	2	Dokumen	179,666,348.00	200	
					1,933		58,894,636,840.00	2,150		49,204,307,631.58		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										111.23	83.55	
										Predikat Kinerja		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Renstra dan Renja harus konsisten dengan RKA dan DPA												

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		K	Rp		K	Rp		%	
		SEKRETARIAT DAERAH									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CUKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	59,920,000.00	6	Dokumen	57,051,800.00	120	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	29,975,400.00	2	Dokumen	14,393,000.00	40	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	19,981,400.00	0	Dokumen	-	0	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	19,981,400.00	1	Dokumen	2,793,000.00	20	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	19,981,400.00	0	Dokumen	2,793,000.00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Dokumen	19,981,400.00	0	Dokumen	67,982,200.00	0	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	19,981,400.00	0	Laporan	-	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498	Orang	9,113,107,026.00	1169	Orang	12,443,382,421.00	78.03738318	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah								
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	Laporan	85,350,000.00	11	Dokumen	94,709,768.00	30.55555556	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah								
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	750,000,000.00	4	Paket	443,654,060.00	200	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	10	Orang	501,060,000.00	7	Orang	77,000,000.00	70	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	98,499,500.00	12	Paket	204,007,500.00	33.33333333	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	552,600,000.00	19	Paket	1,956,791,872.00	158.3333333	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	197,222,000.00	7	Paket	291,107,000.00	58.33333333	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	80,850,000.00	2	Paket	101,542,650.00	8	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	180	Laporan	251,254,500.00	125	Laporan	1,195,969,000.00	69.44444444	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	841,250,000.00	107	Laporan	3,165,929,884.00	35.66666667	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	unit	452,049,500.00	4	unit	440,362,370.00	40	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	24,541,000.00	14	Laporan	31,000,000.00	116.6666667	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	4,900,716,876.00	12	Laporan	1,117,478,176.00	100	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2,068,000,000.00	13	Laporan	149,550,050.00	108.3333333	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4,556,133,266.00	19	Laporan	5,086,028,638.00	158.3333333	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD Yang Dipelihara								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Unit	1,806,425,000.00	80	Unit	1,657,009,558.00	80	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	274,950,000.00	40	Unit	281,180,650.00	80	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	499,200,000.00	0	Unit	-	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	184,983,000.00	6	Unit	1,259,227,500.00	60	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Dokumen			Dokumen		#DIV/0!	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Dokumen			Dokumen		#DIV/0!	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang	193,106,954.00	18	Orang	132,157,994.00	64.28571429	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	Paket	99,800,000.00	0	Paket	-	0	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang	400,000,000.00	21	Orang	399,905,092.00	87.5	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	40	Paket	2,659,310,500.00	13	Paket	746,900,513.00	32.5	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	Paket	1,430,860,000.00	13	Paket	421,575,344.00	37.14285714	
		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi								
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	40	Dokumen	512,050,000.00	40	Dokumen	754,918,194.00	100	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	Laporan	94,286,000.00	0	Laporan	65,302,054.00	0	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	45	Dokumen	143,522,000.00	45	Dokumen	94,288,813.00	100	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	Laporan	19,910,000.00	23	Laporan	57,448,832.00	115	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10	Dokumen	58,158,000.00	10	Dokumen	111,523,547.00	100	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	70	Laporan	58,122,000.00	30	Laporan	332,867,149.00	42.85714286	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	40	Laporan	50,000,000.00	28	Laporan	197,240,112.00	70	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6	Laporan	42,314,000.00	17	Laporan	416,402,438.00	283.3333333	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan								
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	109,752,000.00	1	Dokumen	248,604,910.00	33.33333333	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Dokumen	901,023,000.00	3	Dokumen	252,163,286.00	100	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	10	Dokumen	72,986,300.00	10	Dokumen	269,763,015.00	100	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7	Dokumen	817,218,000.00	7	Dokumen	7,054,253,242.00	100	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5	Dokumen	20,040,000.00	5	Dokumen	59,500,600.00	100	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	Dokumen	78,152,486.00	4	Dokumen	5,150,388,372.00	133.3333333	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300	Dokumen	88,490,000.00	394	Dokumen	264,689,147.00	131.3333333	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5	Kasus	110,630,000.00	0	Kasus	121,862,679.00	0	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300	Dokumen	226,840,000.00	402	Dokumen	90,994,900.00	134	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kesepakatan Fasilitasi Kerjasama Daerah								
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	22	Kesepakatan	69,901,000.00	7	Kesepakatan	134,329,882.00	31.81818182	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan								
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian								
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen	25,000,000.00	3	Dokumen	148,028,801.00	150	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Dokumen	220,080,000.00	1	Dokumen	179,148,609.00	100	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen	210,060,000.00	1	Dokumen	100,845,318.00	100	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dokumen	25,000,000.00	1	Dokumen	43,477,050.00	100	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8	Dokumen	323,031,000.00	8	Dokumen	275,815,684.00	100	
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Laporan	49,978,746.00	4	Laporan	373,746,155.00	100	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	50,000,000.00	2	Laporan	415,584,366.00	100	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tender Pengadaan barang/ Jasa yang Diselesaikan								
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	120	Dokumen	580,715,208.00	178	Dokumen	168,668,771.00	148.3333333	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	38	SKPD	34,110,000.00	38	SKPD	291,999,349.00	100	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	38	Orang	2,100,000.00	38	Orang	363,643,233.00	100	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan SDA								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	Dokumen	25,020,000.00	0	Dokumen	118,480,173.00	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	Dokumen	24,940,000.00	0	Dokumen	52,719,550.00	0	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Ketersediaan Data Bidang ESDM dan Rasio Elektrifikasi	2	Dokumen	49,850,000.00	0	Dokumen	116,367,550.00	0	
				3,614		37,304,351,262.00	3,025		50,166,548,821.00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							83.7023		134.48		
Predikat Kinerja											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Renstra dan Renja harus konsisten dengan RKA dan DPA											

FORMULIR E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		K		Rp	K		Rp	%	
		SEKRETARIAT DAERAH									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CUKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Cascading (Pemetaan) Kinerja Sekretariat Daerah				0	Dokumen		#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretariat Daerah				0	Dokumen		#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah				0	Dokumen		#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Perubahan Sekretariat Daerah				0	Dokumen		#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) Sekretariat Daerah				0	Dokumen		#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah				0	Dokumen		#DIV/0!	
			Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah				0	Laporan		#DIV/0!	
			Jumlah Laporan Penetapan Indikator Utama (IKU) Sekretariat Daerah	5	Dokumen	10,000,000.00	0	Laporan		-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Laporan	160,000,000.00	0	Laporan		-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498	Orang	14,712,729,894.00	1201	Orang	25,786,365,342.00	80.17	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	Dokumen	77,870,654.00	0	Dokumen	0	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah								
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	83,750,000.00	1	Paket	83,750,000.00	50.00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	10	Orang	32,500,000.00	5	Orang	24,300,000.00	50.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	134,496,500.00	10	Paket	235,399,500.00	27.78	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	979,559,360.00	11	Paket	1,476,475,293.00	91.67	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	225,988,000.00	10	Paket	261,234,000.00	83.33	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	Paket	72,028,500.00	2	Paket	71,755,800.00	8.00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	180	Laporan	1,503,469,000.00	30	Laporan	2,161,682,800.00	16.67	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	3,088,307,000.00	83	Laporan	5,226,822,713.00	27.67	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit		0	unit	0	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	unit	174,393,000.00	0	unit	312,437,000.00	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Dokumen	40,018,000.00	9	Dokumen	62,000,000.00	75.00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Dokumen	1,026,094,440.00	17	Dokumen	1,799,061,938.00	141.67	

SETDA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi			Persentase Capaian Kinerja (Target K/Realisasi K)	SKPD Penanggung jawab
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Dokumen	78,500,000.00	6	Dokumen	155,638,000.00	50.00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Dokumen	4,738,361,548.00	18	Dokumen	9,935,059,440.00	150.00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	95	Unit	362,070,336.00	0	Unit	0.00	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Unit	1,656,581,000.00	73	Unit	2,555,171,685.00	73.00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	269,150,000.00	37	Unit	316,363,850.00	74.00	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	500,000,000.00	4	Unit	0	80.00	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8	Unit	1,400,000,000.00	0	Unit	0	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	Unit	546,599,000.00	3	Unit	899,094,700.00	30.00	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang	223,106,954.00	15	Orang	389,231,116.00	53.57	
		Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	Paket	75,000,000.00	0	Paket	0	-	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang	400,000,000.00	3	Orang	700,000,000.00	12.50	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	40	Paket	863,479,500.00	14	Paket	1,490,106,830.00	35.00	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	35	Paket	558,575,000.00	10	Paket	797,260,000.00	28.57	
		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi								
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	Dokumen	224,965,000.00	3	Dokumen	405,790,936.00	100.00	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Dokumen	73,144,000.00	3	Dokumen	86,293,517.00	100.00	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	Dokumen	122,482,000.00	3	Dokumen	170,229,400.00	100.00	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata laksana	3	Dokumen	63,916,000.00	3	Dokumen	101,739,558.00	100.00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Dokumen	102,518,000.00	3	Dokumen	177,916,060.00	100.00	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan								
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	30	kegiatan	325,020,000.00	29	kegiatan	488,036,811.00	96.67	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	20	kegiatan	175,782,000.00	27	kegiatan	227,714,678.00	135.00	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2	Dokumentasi	300,182,000.00	10	Dokumentasi	439,130,226.00	500.00	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peresentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan								
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dokumen	135,934,000.00	2	Dokumen	158,723,050.00	66.67	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	Dokumen	238,732,000.00	3	Dokumen	295,364,200.00	100.00	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	10	Dokumen	76,277,500.00	20	Dokumen	106,029,285.00	200.00	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat								
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Sidang Isbat yang Difasilitasi	2	kegiatan	3,746,993,000.00	1	Kegiatan	4,790,045,022.00	50.00	
			Jumlah Kegiatan Jamaah Ibadah Haji Dalam Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	2	kegiatan		2	Kegiatan	0	100.00	
			Jumlah Kegiatan MTQ dan Keikutsertaan STQ/ MTQ Tk. Provinsi Serta Pendampingan Tingkat Nasional	2	kegiatan		2	Kegiatan	0	100.00	
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	3	kegiatan		3	Kegiatan	0	100.00	

[illegible]

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Persentase Capaian Kinerja <i>(Target K/Realisasi K)</i>	SKPD Penanggung jawab
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Renstra dan Renja harus konsisten dengan RKA dan DPA							

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi.

LKIP ini disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menyajikan informasi kinerja yang lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil. Laporan ini memuat capaian sasaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang disajikan secara terukur dan transparan, serta disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, dan hasil kinerja.

Melalui penyusunan LKIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan serta menjadi bahan evaluasi terhadap keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja. LKIP juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 masih terdapat keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi sangat diperlukan sebagai dasar perbaikan kinerja serta penyempurnaan penyusunan LKIP pada periode selanjutnya.

Akhir kata, semoga LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencapaian hasil yang lebih baik pada periode selanjutnya

- * Dasar Penyusunan ~~LKIP~~ / LKIP dari Permen RB S3 Th. 2019
- * Data Bob II harus berdasarkan PK / Iku
- * 1 Sektor menurut 7 langkah sesuai Permen.
- * Tambahan Rumus pada Bob. II
- * yg digunakan
- * Pada PK harus tambahkan Realisasi / Capaian (tingkat)
- * PK masuk di lampiran, bukan pada Bob II (PK yg sudah di sebutkan)
- * Batas Penerimaan Februari


Darmadi



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi.

LKIP ini disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menyajikan informasi kinerja yang lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil. Laporan ini memuat capaian sasaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 yang disajikan secara terukur dan transparan, serta disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaksanaan, dan hasil kinerja.

Melalui penyusunan LKIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan serta menjadi bahan evaluasi terhadap keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja. LKIP juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 masih terdapat keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan rekomendasi sangat diperlukan sebagai dasar perbaikan kinerja serta penyempurnaan penyusunan LKIP pada periode selanjutnya.

Akhir kata, semoga LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencapaian hasil yang lebih baik pada periode selanjutnya.





HASIL REVIU NARASUMBER

Berdasarkan hasil reviu dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan bersama narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sesi diskusi dalam Kegiatan Asistensi Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2026 dan LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Luwansa pada tanggal 03 s.d. 05 Februari 2026, diketahui bahwa pengisian Akuntabilitas Kinerja pada setiap indikator kinerja secara umum telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya pada rumus perhitungan target capaian indikator kinerja untuk Indikator 2 dan Indikator 3. Berdasarkan hasil asistensi, disarankan agar perhitungan capaian dicek kembali untuk memastikan kesesuaian antara rumus, target, dan realisasi yang telah ditetapkan, sehingga penyajian capaian kinerja tetap sesuai dengan prinsip pengukuran kinerja yang akuntabel dan terukur.

Selain itu, pada tabel kegagalan dan solusi agar ditambahkan uraian yang lebih rinci terkait penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja, misalnya dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti keterbatasan data dukung, keterlambatan penyampaian laporan dari perangkat daerah terkait, maupun kendala teknis lainnya, serta langkah-langkah perbaikan atau solusi yang dilakukan sebagai tindak lanjut.

Selanjutnya, pada tabel sumber data disarankan untuk menampilkan perbandingan antara indikator kinerja yang ditetapkan dengan capaian realisasi kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam proses evaluasi serta analisis terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

J. Nuria I-T
27 Februari 2026.

DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI

Dengan Inspektorat Kabupaten Seruyan



DOKUMENTASI KEGIATAN ASISTENSI

Dengan Narasumber Dari KemenpanRB





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Kuala Pembuang, Seruyan, Kalimantan Tengah kode Pos 74212
Telepon : (0538) 2022211, Fax. (0538) 2022211 Laman : www.seruyankab.go.id

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Yth. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan

di -
Kuala Pembuang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050.12/ 04 /ADBANG/II/2026

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Dokumen LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025	1 (satu) Dokumen	disampaikan untuk diketahui dan bahan tindak lanjut sebagai mana mestinya.

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KAB. SERUYAN

ROBY LESMANA GELIAN, SE., MM
NIP. 19770701 200501 1 012

Tembusan ;
Yth. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang (Sebagai Laporan)

J. Nuria I.T
27 Februari 2026